

**PENGARUH PENGAWASAN DETEKTIF, PREVENTIF
DAN FUNGSIONAL TERHADAP EFEKTIVITAS
PENGENDALIAN ANGGARAN PADA SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

TESIS

**ALFIAN
MEM 4616104005**



**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar
Magister**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR
2018**

TESIS

**PENGARUH PENGAWASAN DETEKTIF, PREVENTIF
DAN FUNGSIONAL TERHADAP EFEKTIVITAS
PENGENDALIAN ANGGARAN PADA SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

**ALFIAN
MEM 4616104005**

Telah dipertahankan di depan penguji

Pada tanggal :

Dinyatakan telah memenuhi syarat

**Menyetujui :
Komisi Pembimbing**

**Prof. Dr. H. Osman Lewangka, MA
Ketua**

**Dr. Muhtar Sapiri, SE, M.Si, Ak
Anggota**

Mengetahui :

**Direktur Program Pascasarjana
Universitas Bosowa**

**Ketua Program Studi
Magister Manajemen**

Dr. Muhlis Ruslan, SE, M.Si

Dr. H. Muhammad Yusuf Saleh, SE, M.Si.

PERNYATAAN KEORISINILAN

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam Naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam Naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Tesis (MAGISTER) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, Mei 2018

Mahasiswa

ALFIAN

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan berkah dan limpahan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga proposal tesis yang berjudul “Pengaruh Pengawasan Detektif, Preventif Dan Fungsional Terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ini” dapat penulis selesaikan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan suatu karya ilmiah tidaklah mudah, oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan dalam penyusunan tesis ini terdapat kekurangan, sehingga penulis sangat mengharapkan masukan, saran, dan kritikan yang bersifat membangun guna kesempurnaan penelitian ini.

Proses penyusunan ini tidak terlepas dari berbagai rintangan, mulai dari pengumpulan literatur, pengumpulan data sampai pada pengolahan data maupun dalam tahap penulisan. Namun dengan kesabaran dan ketekunan yang dilandasi dengan rasa tanggung jawab selaku mahasiswa dan juga bantuan dari berbagai pihak, baik material maupun moril.

Makassar, Mei 2018

Mahasiswa

ALFIAN

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ketua Komisi Pembimbing Prof. Dr. Osman Lewangka, MA dan anggota Komisi Pembimbing Dr. Muktar Sapiri, SE, M.Si, Ak atas arahan bimbingannya selama penulis melakukan konsultasi.
2. Tim Penguji Dr. H. Muhammad Yusuf Saleh, SE, M.Si dan Dr. Firman Menne, SE, M.Si, Ak, CA atas saran dan kritik yang konstruktif secara ilmiah dalam penyempurnaan karya ilmiah ini.
3. Prof. Dr. Ir. H. M. Saleh Pallu, M.Eng selaku Rektor Universitas Bosowa.
4. Dr. Muhlis Ruslan, SE, M.Si selaku Direktur Pascasarjana Universitas Bosowa.
5. Dr. H. Muhammad Yusuf Saleh, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Magister Manajemen yang telah banyak memberikan motivasi dan saran-saran kepada penulis.
6. Seluruh karyawan dan staff Pascasarjana Universitas Bosowa.
7. Sujud Spesial dan terima kasih yang tak terhingga penulis persembahkan kepada Ayahanda tercinta Salahuddin dan Ibunda tercinta Hadeniah beserta Keluarga saya atas kasih sayang, dorongan yang kuat dan doa yang tiada hentinya untuk penulis.
8. Istri tercinta Rani Pratiwi, S. Kep, Ns atas dan anakku tersayang Fariz Nur Pradipta yang selalu memberi dorongan pada saat sedang jenuh dalam perkuliahan dan penulisan tesis ini.
9. Rekan-rekan satu angkatan atas diskusi dan suasana perkuliahan yang indah dan tak terlupakan.
10. Seluruh pegawai lingkup pemerintah daerah kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang telah membantu dalam usaha memperoleh data yang diperlukan.

Makassar, Mei 2018

Mahasiswa

ALFIAN

ABSTRAK

ALFIAN, Pengaruh Pengawasan Detektif, Preventif Dan Fungsional Terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, *(Dibimbing oleh Osman Lewangka dan Muhtar Sapiri)*.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, menginterpretasi dan mengetahui : 1) pengaruh pengawasan detektif terhadap efektivitas pengendalian anggaran; 2) pengaruh pengawasan preventif terhadap efektivitas pengendalian anggaran dan 3) pengaruh pengawasan fungsional terhadap efektivitas pengendalian anggaran.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian survey dengan pendekatan kuantitatif, Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai instansi pemerintahan yang terdaftar dalam satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, peneliti menentukan 1 sampel dari 50 SKPD, sehingga total sampel menjadi 50 orang. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif dan analisis regresi linear berganda dengan bantuan software SPSS 24.

Kesimpulan dari hasil penelitian adalah : 1) Pengawasan detektif berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap efektivitas pengendalian anggaran; 2) Pengawasan preventif berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap efektivitas pengendalian anggaran dan 3) Pengawasan fungsional berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap efektivitas pengendalian anggaran SKPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Kata Kunci : Pengawasan Detektif, Pengawasan Preventif Dan Pengawasan Fungsional Efektivitas Pengendalian Anggaran

ABSTRACT

ALFIAN, The Effect Of Detective, Preventive and Functional Control Of Budget Effectiveness On The Pangkajene and Islands Area Device Working Units (Guided by Osman Lewangka and Muhtar Sapiri).

This study aims to analyze, interpret and know: 1) the effect of detective control on the effectiveness of budget control; 2) the influence of preventive control on the effectiveness of budgetary control and 3) the effect of functional oversight on the effectiveness of budgetary control.

This study included survey type with quantitative approach. The population in this study were government officials registered in the work unit of Pangkajene and Kepulauan Islands, the researcher determined 1 sample from 50 SKPD, so the total sample was 50 people. This research uses descriptive analysis technique and multiple linear regression analysis with the help of SPSS 24 software.

The conclusions of the research results are: 1) Detective supervision positively and significantly influence the effectiveness of budget control; 2) Preventive control has positive and significant impact on the effectiveness of budget control and 3) Functional control has positive and significant influence on the effectiveness of budget control of SKPD Kabupaten Pangkajene and Kepulauan.

Keywords : *Detective Supervision, Preventive Monitoring and Functional Supervision of Budget Effectiveness Control*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEORISINALAN.....	iii
PRAKATA.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR.....	9
A. Deskripsi Teori.....	9
1. Manajemen Keuangan.....	9
2. Pengawasan.....	12
3. Pengawasan Detektif.....	17
4. Pengawasan Preventif.....	20
5. Pengawasan Fungsional.....	28
6. Efektivitas Pengendalian Anggaran.....	34
B. Penelitian Terdahulu.....	41
C. Kerangka Pikir.....	43
D. Hipotesis.....	45
1. Hipotesis 1.....	45
2. Hipotesis 2.....	46
3. Hipotesis 3.....	47

BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Rancangan Penelitian	49
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	49
C. Jenis Data dan Sumber Data	49
D. Populasi, Sampel dan Teknik Penentuan Sampel	50
E. Teknik Pengumpulan Data	53
1. Penelitian Lapangan	53
2. Penelitian Kepustakaan	53
F. Teknik Analisis Data	54
1. Analisis Statistik Deskriptif	54
2. Analisis Regresi Linier Berganda	54
3. Pengujian Hipotesis	59
G. Defenisi Operasional Variabel Penelitian	60
1. Pengawasan Detektif	60
2. Pengawasan Preventif	61
3. Pengawasan Fungsional	61
4. Efektivitas Pengendalian Anggaran	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	66
A. Penjabaran Responden Penelitian	67
1. Usia	67
2. Jenis Kelamin	68
3. Pendidikan Terakhir	69
4. Masa Kerja	70
B. Penjabaran Variabel Penelitian	71
1. Pengawasan Detektif	71
2. Pengawasan Preventif	72
3. Pengawasan Fungsional	74
4. Efektivitas Pengendalian Anggaran	76
C. Pengujian Kualitas Instrumen	78
1. Uji Validitas	78
2. Uji Reliabilitas	82
D. Uji Asumsi Klasik	83

1.	Uji Multikolinearitas	83
2.	Uji Heterokedastisitas	84
3.	Uji Normalitas	86
4.	Uji Linearitas.....	87
E.	Pengujian Hipotesis (Uji t)	88
1.	Pengujian Hipotesis 1	89
2.	Pengujian Hipotesis 2.....	89
3.	Pengujian Hipotesis 3.....	90
F.	Pengujian Secara Simultan (Uji F)	90
G.	Analisis Regresi Linear Berganda	91
H.	Pengujian Koefisien Determinasi	92
I.	Variabel Dominan Berpengaruh.....	94
J.	Pembahasan Hasil Penelitian.....	95
1.	Pengaruh Pengawasan Detektif Terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran Pada SKPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	95
2.	Pengaruh Pengawasan Preventif Terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran Pada SKPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	96
3.	Pengaruh Pengawasan Fungsional Terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran Pada SKPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	98
K.	Keterbatasan Penelitian	99
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	100
A.	Kesimpulan.....	100
B.	Saran-Saran.....	101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
3.1	Distribusi Sampel Penelitian	51
3.2	Defenisi Operasional Variabel Penelitian	63
4.1	Hasil Pengujian Multikolinearitas	84
4.2	Hasil Pengujian Heterokedastisitas	85
4.3	Hasil Uji Normalitas	86
4.4	Hasil Uji Linearitas	87
4.5	Hasil Pengujian Simultan	91
4.6	Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	92
4.7	Hasil Pengujian Koefisien Determinasi	93

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Uraian	Halaman
2.1	Model Penelitian	45
4.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	67
4.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	68
4.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	69
4.4	Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja	70
4.5	Distribusi Persepsi Responden Terhadap Variabel Pengawasan Detektif	71
4.6	Distribusi Persepsi Responden Terhadap Variabel Pengawasan Preventif	73
4.7	Distribusi Persepsi Responden Terhadap Variabel Pengawasan Fungsional	75
4.8	Distribusi Persepsi Responden Terhadap Variabel Efektivitas Pengendalian Anggaran	77
4.9	Hasil Uji Validitas Variabel Pengawasan Detektif	79
4.10	Hasil Uji Validitas Variabel Preventif	80
4.11	Hasil Uji Validitas Variabel Fungsional	81
4.12	Hasil Uji Validitas Variabel Efektivitas Pengendalian Anggaran	81
4.13	Hasil Uji Reliabilitas	82

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Tabel
Lampiran	
1	Kuesioner Penelitian
2	Tabulasi Jawaban Responden
3	Distribusi Frekuensi Jawaban Responden
4	Hasil Uji Validitas Variabel
5	Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian
6	Hasil Uji Multikolinearitas
7	Hasil Uji Heterokedastisitas
8	Hasil Uji Normalitas
9	Hasil Uji Linearitas
10	Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
11	Mapping Jurnal

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, telah terjadi pelimpahan kewenangan yang semakin luas kepada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sebagai upaya peningkatan kinerja ekonomi daerah. Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa dan bertanggungjawab untuk mengelola sumber-sumber keuangan yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas dan potensi daerah sendiri.

Manajemen keuangan merupakan bagian yang mengatur berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pendanaan disebuah perusahaan, selain itu berbagai manfaat dapat diperoleh dengan adanya manajemen keuangan di suatu organisasi. Manajemen keuangan adalah keseluruhan aktivitas yang bersangkutan dengan usaha untuk mendapatkan dana dan menggunakan atau mengalokasikan dana tersebut, Bambang Riyanto (2013).

Manajemen keuangan erat kaitanya dengan anggaran. Anggaran menjadi sangat penting di pemerintah daerah karena anggaran berdampak terhadap kinerja pemerintah yang dikaitkan dengan fungsi pemerintah dalam memberi pelayanan kepada masyarakat. Anggaran merupakan dokumen atau

kontrak politik antara pemerintah dan DPRD sebagai wakil rakyat untuk masa yang akan datang. Anggaran pada prinsipnya digunakan sebagai pedoman kerja, pengkoordinasian kerja, dan pengawasan kerja (Munandar, 2001:10).

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan, memegang peranan penting untuk membina serta mengawasi jalannya anggaran dengan membentuk peraturan perundang-undangan dan menyiapkan aparat yang kompeten. Untuk menyiapkan aparat pengawasan yang kompeten maka pemerintah melakukan pembinaan. Pembinaan dilakukan dengan memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, supervisi, dan evaluasi di bidang pengelolaan keuangan daerah terhadap aparat yang menjalankan dan yang mengawasi jalannya anggaran (PP Nomor 20 Tahun 2001).

Salah satu Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan di Sulawesi Selatan adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Tertanggal 6 Juni 2017 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulsel memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Tahun 2016. Hal ini menandakan bahwa pengelolaan keuangan daerah berlangsung baik.

Pengawasan menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit APIP menyebutkan bahwa Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi

organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

Menurut Baswir (2002:118), Pengawasan secara umum adalah segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dari tujuan serta rencana yang telah direncanakan. Sedangkan pengawasan menurut Halim (2002:145) yaitu pengawasan adalah suatu proses kegiatan penilaian terhadap objek pengawasan kegiatan tertentu dengan tujuan untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi objek pengawasan dan atau kegiatan tersebut telah sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Pengawas pelaksanaan anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan diawasi oleh satuan unit pelaksanaan anggaran, baik saat realisasi anggaran dan setelah realisasi anggaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan (Permendagri Nomor 71 tahun 2010).

Pengendalian terhadap pelaksanaan anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dilakukan dengan tujuan menjamin agar

pengumpulan penerimaan negara dan penyaluran pengeluaran-pengeluaran negara, tidak menyimpang dari rencana yang telah digariskan dalam anggaran negara (Revrison, 2000:118). Untuk mengetahui pengendalian terhadap anggaran tersebut berjalan dengan sebagaimana mestinya maka hal tersebut diukur dengan efektivitas. Mardiasmo (2004:134) mengatakan bahwa efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Jadi, efektifitas pengendalian anggaran adalah berhasil atau tidaknya tujuan dari pengendalian terhadap anggaran tersebut dilaksanakan.

Pengawasan terhadap anggaran SKPD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan secara berkala diperlukan bagi setiap pimpinan SKPD. Hal ini diperlukan agar pimpinan SKPD dapat segera mengambil langkah-langkah sehingga anggaran kegiatan dapat dikendalikan sesuai target kinerja yang telah ditetapkan serta dapat dicapai tepat waktu. Dalam mencapai efektivitas pengendalian anggaran yang lebih baik diperlukan pengawasan baik secara detektif, preventif maupun fungsional.

Menurut Revrison (2000:123), pengawasan detektif adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen-dokumen laporan pertanggung jawaban bendaharawan. Pengawasan detektif biasanya dilakukan setelah dilakukannya kegiatan, yaitu dengan membandingkan antara hal yang sudah terjadi dengan hal yang seharusnya terjadi. Pengawasan detektif dimaksudkan untuk mengetahui apakah kegiatan dan pembiayaan yang telah ditentukan itu telah mengikuti kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Hasil Penelitian Julio (2014) menemukan

bahwa Pengawasan detektif berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengendalian anggaran dengan studi empiris pada SKPD Kabupaten Kampar.

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang bersifat mencegah agar pemerintah daerah tidak mengambil kebijakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pusdiklatwas BPKP, 2007:3) Menurut Baswir (2000:120), pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum dimulainya pelaksanaan suatu kegiatan, atau sebelum terjadinya pengeluaran keuangan negara. Pengawasan preventif pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada dasarnya dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan.

Hasil penelitian Bayu (2017) menemukan bahwa pengawasan preventif berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian anggaran. Hal ini berarti dengan adanya pengawasan preventif, maka akan meningkatkan efektivitas pengendalian anggaran di SKPD Kota Dumai. Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian Julio (2014) menemukan bahwa Pengawasan preventif tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengendalian anggaran dengan studi empiris pada SKPD Kabupaten Kampar.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan juga melakukan pengawasan fungsional. Menurut Sumarsono (2010:253) pengertian pengawasan fungsional adalah Pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional baik yang berasal dari lingkungan internal pemerintah maupun yang berasal dari lingkungan eksternal pemerintah.

Pengawasan fungsional adalah Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga/badan/Inti yang mempunyai tugas melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian, penilaian, monitoring, dan evaluasi.

Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional. Pengawasan fungsional pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dilakukan oleh inspektorat daerah, yang melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah, pada Inspektorat khususnya mengenai pengawasan fungsional pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah agar dapat memenuhi tujuan efektifitas pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian Lilik Singgih Purnomo (2016) dalam tesisnya dengan judul pengaruh anggaran berbasis kinerja, pengawasan preventif dan Pengawasan fungsional terhadap pengendalian anggaran SKPD Kabupaten Grobongan pada hasil pengujiannya menunjukkan adanya pengaruh pengawasan preventif terhadap efektivitas pengendalian anggaran.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik mengadakan penelitian dengan judul “Pengaruh Pengawasan Detektif, Preventif dan Fungsional Terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan”.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang disampaikan, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Apakah pengawasan detektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengendalian anggaran pada SKPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan?.
2. Apakah pengawasan preventif berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengendalian anggaran pada SKPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan?.
3. Apakah pengawasan fungsional berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengendalian anggaran pada SKPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan?.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai :

1. Menganalisis, menginterpretasi dan mengetahui pengaruh pengawasan detektif terhadap efektivitas pengendalian anggaran pada SKPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Menganalisis, menginterpretasi dan mengetahui pengaruh pengawasan preventif terhadap efektivitas pengendalian anggaran pada SKPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
3. Menganalisis, menginterpretasi dan mengetahui pengaruh pengawasan fungsional terhadap efektivitas pengendalian anggaran pada SKPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang telah dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain yaitu :

1. Bagi Penulis

Manfaat penelitian ini bagi penulis adalah penulis dapat menerapkan salah satu materi yang sudah diberikan selama perkuliahan dan penulis juga dapat memahami lebih mendalam tentang materi tersebut.

2. Bagi Instansi

Bagi instansi bermanfaat untuk menerapkan langkah-langkah apa yang harus diambil untuk mempertahankan atau meningkatkan efektivitas pengendalian anggaran SKPD di masa yang akan datang.

3. Bagi Akademis

Bagi Akademis penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi untuk lebih mengetahui dan memahami tentang pengawasan detektif, pengawasan preventif dan pengawasan fungsional serta efektivitas pengendalian anggaran.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Rancangan penelitian ini adalah *explanatory research* dengan pendekatan kuantitatif. Lokasi penelitian ini adalah di seluruh SKPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan subyeknya adalah pegawai SKPD yang berjumlah 1 orang setiap SKPD. sampel ditentukan dengan purposive sampling, teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang selanjutnya akan dianalisis dengan software SPSS 24.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Deskripsi Teori

1. Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan merupakan salah satu fungsi operasional perusahaan yang berkaitan dengan investasi, pendanaan dan manajemen aktiva. Oleh karena itu seorang manajer keuangan harus mampu mencari dana dan mampu mengalokasikan sumber dana tersebut untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan agar perusahaan dapat berjalan dengan baik dan dapat menghasilkan laba yang maksimal.

Manajemen keuangan adalah salah satu fungsi operasional perusahaan yang sangat penting disamping fungsi operasional lainnya seperti manajemen pemasaran, manajemen operasi, manajemen sumber daya manusia dan lainnya. manajemen keuangan membicarakan pengelolaan keuangan yang pada dasarnya dapat dilakukan baik oleh individu, perusahaan, maupun pemerintah. Menurut Agus Sartono (2010) manajemen keuangan dapat diartikan sebagai manajemen baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif maupun usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi atau pembelanjaan secara efisien.

Manajemen keuangan merupakan bagian yang mengatur berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pendanaan disebuah perusahaan, selain itu berbagai manfaat dapat diperoleh dengan adanya manajemen keuangan

di suatu organisasi. Manajemen keuangan adalah keseluruhan aktivitas yang bersangkutan dengan usaha untuk mendapatkan dana dan menggunakan atau mengalokasikan dana tersebut, Bambang Riyanto (2013).

Menurut Horne dan Wachowics (2012:2) manajemen keuangan adalah berkaitan dengan perolehan asset, pendanaan dan manajemen asset dengan didasari dengan beberapa tujuan umum. Sedangkan menurut Sutrisno (2012:3) manajemen keuangan adalah semua aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha-usaha mendapatkan dana perusahaan dengan biaya yang murah serta usaha untuk menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut secara efisien.

Pernyataan tersebut senada dengan Kamaluddin (2011:1) bahwa manajemen keuangan adalah upaya untuk mendapatkan dana dengan cara yang paling menguntungkan serta mengalokasikan dana secara efisien dalam perusahaan sebagai sarana untuk mencapai sasaran bagi pemegang saham.

Berdasarkan pengertian diatas maka peneliti menyimpulkan manajemen keuangan merupakan aktivitas yang berkaitan dengan perolehan asset, pengelolaan asset dan manajemen asset dengan didasari tujuan umum seperti efisiensi dalam penggunaan dan memaksimalkan keuntungan.

Sutrisno (2012) menjelaskan fungsi manajemen keuangan terdiri dari tiga keputusan utama yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan, tiga keputusan perusahaan tersebut adalah :

1. Keputusan Investasi

Keputusan Investasi adalah masalah bagaimana manajer keuangan harus mengalokasikan dana kedalam bentuk-bentuk investasi yang akan dapat mendatangkan keuntungan dimasa yang akan datang. bentuk, macam dan komposisi dari investasi tersebut akan mempengaruhi dan menunjang keuntungan dimasa depan.

2. Keputusan Pendanaan (*Financing Decision*)

Keputusan pendanaan sering disebut sebagai kebijakan struktur modal. Pada keputusan ini manajer keuangan dituntut mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi dari sumber-sumber dana yang ekonomis bagi perusahaan guna membelanjai kebutuhan-kebutuhan investasi serta kegiatan usahanya.

3. Keputusan Dividen

Keputusan dividen merupakan keputusan manajemen keuangan untuk menentukan :

- a. Besarnya persentase laba yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk cash dividend;
- b. Stabilitas Dividen yang dibagikan;
- c. Dividen saham (*stock dividend*);
- d. Pemecahan saham (*stock split*);
- e. Penarikan kembali saham yang beredar;

Semua penentuan itu ditujukan untuk meningkatkan kemakmuran pemegang saham.

Menurut Kamaludin (2011) adapun tujuan normative dalam manajemen keuangan adalah memaksimalkan nilai perusahaan atau kemakmuran pemegang saham. Sedangkan menurut Sutrisno (2012:4) tujuan utama manajemen keuangan yaitu meningkatkan kemakmuran pemegang saham atau pemilik. dari dua pendapat tersebut tujuan manajemen keuangan intinya yaitu memaksimalkan nilai perusahaan dan meningkatkan kemakmuran para pemegang saham, dengan kedua tujuan tersebut jelas manajer keuangan dituntut untuk dapat mencapai tujuan tersebut dengan berbagai strategi.

Tujuan manajemen keuangan adalah memaksimalkan nilai kekayaan para pemegang saham, yang berarti meningkatkan nilai perusahaan yang merupakan ukuran nilai objektif oleh public dan orientasi pada kelangsungan hidup perusahaan. Nilai kekayaan dapat dilihat melalui perkembangan harga saham (common stock) perusahaan di pasar, Harmono (2011).

2. Pengawasan

Agar pengawasan ini dapat berjalan lancar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka diperlukannya peran lembaga-lembaga teknis dan fungsional yang berkaitan dengan tugas pengawasan baik di daerah maupun dipusat secara efektif. Bila ternyata dikemudian ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan itu diharapkan dapat segera dikendalikan dan

dapat pula segera diambil tindakan koreksi. Melalui tindakan koreksi ini, maka pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan diharapkan masih dapat mencapai tujuannya secara maksimal sehingga dapat meningkatkan kinerja unit kerja. Fenomena yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa pemberian otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang terlalu cepat tanpa pengawasan yang cukup justru meningkatkan korupsi daerah. Salah satu cara yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan mengoptimalkan fungsi pengawasan.

Pengawasan menurut Peraturan Pemerintah No.79 Tahun 2005 Pasal 1 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa, Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit APIP menyebutkan bahwa Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

Menurut Baswir (2002:118), Pengawasan secara umum adalah segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dari tujuan serta rencana yang telah direncanakan. Sedangkan pengawasan menurut Halim (2002:145) yaitu pengawasan adalah suatu proses kegiatan penilaian terhadap objek pengawasan kegiatan tertentu dengan tujuan untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi objek pengawasan dan atau kegiatan tersebut telah sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Secara umum tujuan pengawasan adalah untuk menjamin agar pemerintahan daerah menjalankan tugasnya sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk membentuk aparatur pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, sedangkan tujuan pengawasan secara khusus, yaitu :

- a. Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas umum pemerintahan dilakukan secara tertib berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta berdasarkan sendi kewajaran penyelenggaraan pemerintahan agar tercapai daya guna, hasil guna dan tepat guna yang sebaik-baiknya.
- b. Menilai kesesuaian dengan pedoman akuntansi yang berlaku agar pelaksanaan pembangunan dilakukan sesuai dengan rencana dan program pemerintah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tercapai sasaran yang ditetapkan.

- c. Menilai apakah kegiatan dilaksanakan secara ekonomis, efektif dan efisien agar pelaksanaan pembangunan dilakukan sesuai dengan rencana dan program pemerintah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tercapai sasaran yang ditetapkan.
- d. Mendeteksi adanya kecurangan agar mencegah terjadinya pemborosan, kebocoran, dan penyimpangan dalam penggunaan wewenang, tenaga, uang dan perlengkapan milik Negara, sehingga dapat terbina aparatur yang tertib, bersih, berwibawa, berhasil dan berdaya guna. Pengawasan bukan untuk memeriksa tetapi lebih mengarah pada pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan hasil yang akan dikehendaki dalam peraturan daerah. Pengawasan merupakan bagian dari pengendalian, adanya kelemahan pada pengawasan akan menghasilkan pelaksanaan dari realisasi anggaran yang tidak optimal. Pengawasan bertujuan untuk menjaga agar rencana dan realisasinya tetap terarah pada tujuan yang telah ditentukan dan sesuai dengan peraturan (Widjaja, 2002:94).

Pengawasan adalah kegiatan yang mengusahakan agar pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan hasil yang dikehendaki. Dalam pengertian tersebut maka tujuan dari pengawasan yaitu mengusahakan agar pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan khusus biasanya dibentuk untuk mengawasi penyimpangan dan masalah yang ada dalam bidang administrasi disuatu lingkungan pemerintahan yang dianggap mengandung dampak yang besar terhadap jalannya pemerintahan. Pengawasan khusus ini dapat dilakukan

oleh BPKP atau oleh tim pemeriksa gabungan yang dibentuk oleh kepala BPKP.

Kegiatan pengawasan tahunan didasarkan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Dalam pelaksanaannya PKPT dikoordinasikan oleh BPKP yaitu diantaranya :

- a. Menerbitkan nama pengawas aparat pengawasan fungsional pemerintah.
- b. Mengeluarkan pedoman pemeriksaan.
- c. Memantau pelaksanaan PKPT.
- d. Menyelenggarakan rapat koordinasi aparat pengawasan fungsional pemerintah untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan PKPT.

Pengawasan merupakan kegiatan yang mempunyai peranan yang sangat penting bagi lancarnya kegiatan suatu organisasi. Pengawasan bisa menjadi fungsi pengendali bagi manajemen untuk memastikan bahwa rencana-rencana yang telah mereka tetapkan dapat berjalan dengan mulus dan lancar sehingga organisasi bisa mencapai setiap sasaran yang telah ditetapkannya. Lebih detailnya, fungsi pengawasan adalah :

- a. Sebagai sarana manajemen untuk memberikan penilaian apakah pengendalian yang telah dilakukan oleh manajemen sudah mencukupi serta telah dikerjakan dengan efektif.
- b. Untuk memberikan penilaian apakah organisasai telah berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan seperti yang telah dilaporkan oleh pelaksanaan tugas.

- c. Untuk memberikan penilaian apakah setiap bagian dari manajemen telah mengerjakan tugas yang menjadi tanggungjawabnya.
- d. Untuk memastikan apakah pekerjaan telah dilakukan secara efektif dan efisien.
- e. Untuk memastikan apakah tujuan organisasi telah tercapai atau tidak. Jadi fungsi pengawasan adalah untuk memberikan analisis, menilai, merekomendasikan, dan menyampaikan hasil laporan sehubungan dengan bidang pekerjaan organisasi yang telah diteliti.

3. Pengawasan Detektif

Pengawasan detektif adalah segala tindakan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan negara berjalan sesuai dengan tujuan, rencana, dan aturan-aturan yang telah digariskan. Karena yang menjadi objek pengendalian keuangan negara terutama adalah anggaran negara, maka pengendalian keuangan negara dari segi anggaran dapat pula dinyatakan sebagai segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan penerimaan-penerimaan negara, dan penyaluran pengeluaran-pengeluaran negara, tidak menyimpang dari rencana yang telah digariskan dalam anggaran (Pratama, 2014).

Pengawasan detektif adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen-dokumen laporan pertanggung-jawaban bendaharawan. Pengawasan detektif biasanya dilakukan setelah dilakukannya kegiatan, yaitu dengan membandingkan antara hal yang terjadi dengan hal yang seharusnya terjadi. Pengawasan

detektif dimaksudkan untuk mengetahui apakah kegiatan dan pembiayaan yang telah ditentukan itu telah mengikuti kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Menurut Revrisond (2000:123), pengawasan detektif adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen-dokumen laporan pertanggungjawaban bendaharawan. Pengawasan detektif biasanya dilakukan setelah dilakukannya kegiatan, yaitu dengan membandingkan antara hal yang sudah terjadi dengan hal yang seharusnya terjadi. Pengawasan detektif dimaksudkan untuk mengetahui apakah kegiatan dan pembiayaan yang telah ditentukan itu telah mengikuti kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan caranya, pengawasan detektif dibedakan atas dua bagian, yaitu: pengawasan dari jauh dan pengawasan dari dekat. Pengawasan dari jauh adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara menguji dan meneliti laporan pertanggungjawaban bendaharawan beserta bukti-bukti pendukungnya.

Pengawasan jenis ini cenderung bersifat pasif, karena pengawasan tidak berhubungan secara langsung dengan objek yang diperiksa. Pengawasan ini juga memiliki kelemahan yang mendasar. Bukti-bukti yang diperiksa seringkali hanya diperhatikan aspek formalnya, sedangkan aspek materialnya yaitu mengenai akurasi bukti itu yang dibandingkan dengan barang yang telah dibeli atau kegiatan yang telah dibiayai, cenderung terabaikan.

Sedangkan yang dimaksud dengan pengawasan dari dekat adalah pengawasan yang dilakukan di tempat berlangsungnya pekerjaan atau di tempat diselenggarakannya kegiatan administrasi. Pemeriksaan dalam hal ini tidak hanya dilakukan terhadap bukti-bukti penerimaan atau bukti pengeluaran, tetapi dilanjutkan terhadap akurasi bukti-bukti tersebut secara material. Kelemahan utama dari pengawasan ini adalah kemungkinan kolusi antara aparat pengawasan dengan pihak yang sedang diawasi. Hal ini dimungkinkan karena sebelum melaksanakan tugas, biasanya petugas pemeriksa terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mengenai waktu pengawasan, kepada instansi yang akan diperiksa. Sehingga instansi yang akan diperiksa dapat menyiapkan diri terlebih dahulu dengan menertibkan administrasi keuangannya.

Makmur (2011:67) menyatakan pengawasan detektif adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen-dokumen laporan pertanggungjawaban Bendaharawan. Berdasarkan cara melakukan pengawasan detektif dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a. Pengawasan dari jauh. Pengawasan dilakukan dengan cara meneliti laporan pertanggung jawaban bendahawan, beserta bukti-bukti pendukungnya.
- b. Pengawasan dari dekat. Pengawasan dilakukan di tempat diselenggaranya kegiatan administrasi.

4. Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang bersifat mencegah agar pemerintah daerah tidak mengambil kebijakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pusdiklatwas BPKP, 2007:3) Menurut Baswir (2000:120), pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum dimulainya pelaksanaan suatu kegiatan, atau sebelum terjadinya pengeluaran keuangan negara. Pengawasan preventif pada dasarnya dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan.

Widjaja (2002:95) menyatakan bahwa pengawasan preventif pada umumnya tidak dilakukan oleh unit-unit pengawasan yang telah ditetapkan dan mempunyai prosedur-prosedur yang harus dilalui dalam melaksanakan kegiatan.

Menurut Baswir (2000:123), ada 4 tujuan pengawasan preventif, yaitu:

- a. Mencegah terjadinya tindakan yang menyimpang dari rencana yang telah ditentukan.
- b. Memberi pedoman demi terselenggaranya pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien.
- c. Menentukan sasaran dan tujuan yang akan dicapai.
- d. Menentukan kewenangan dan tanggung jawab sebagai instansi sehubungan dengan tugas yang harus dilaksanakan.

Terkait dengan penjelasan diatas maka perlu dilakukan kegiatan preventif berupa kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, disebutkan bahwa monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Tindakan tersebut diperlukan seandainya hasil pengamatan menunjukkan adanya hal atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan semula. Tujuan Monitoring untuk mengamati/ mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasinya/upaya pemecahannya.

Definisi Evaluasi menurut OECD, disebutkan bahwa Evaluasi merupakan proses menentukan nilai atau pentingnya suatu kegiatan, kebijakan, atau program. Evaluasi merupakan sebuah penilaian yang subyektif dan sesistematis mungkin terhadap sebuah intervensi yang direncanakan, sedang berlangsung atau pun yang telah diselesaikan. Hal-hal yang harus dievaluasi yaitu proyek, program, kebijakan, organisasi, sector, tematik, dan bantuan Negara. Kegunaan Evaluasi, adalah untuk:

- a. Memberikan informasi yg valid ttg kinerja kebijakan, program & kegiatan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai.
- b. Memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yg mendasari pemilihan tujuan dan target.
- c. Melihat peluang adanya alternatif kebijakan, program, kegiatan yang lebih tepat, layak, efektif, efisien.
- d. Memberikan umpan balik terhadap kebijakan, program dan proyek.
- e. Menjadikan kebijakan, program dan proyek mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik.
- f. Mambantu pemangku kepentingan belajar lebih banyak mengenai kebijakan, program dan proyek.
- g. Dilaksanakan berdasarkan kebutuhan pengguna utama yang dituju oleh evaluasi.
- h. Negosiasi antara evaluator and pengguna utama yang dituju oleh evaluasi.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar. Evaluasi merupakan merupakan kegiatan yang menilai hasil yang diperoleh selama kegiatan pemantauan berlangsung. Lebih dari itu, evaluasi juga menilai hasil atau produk yang telah dihasilkan dari suatu rangkaian program sebagai dasar mengambil keputusan tentang tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan tindakan selanjutnya yang diperlukan.

Pengendalian merupakan serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana yang ditetapkan.

- a. Pimpinan Kementerian/Lembaga/SKPD melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
- b. Melekat pada tugas dan fungsi.
- c. Pengendalian dilakukan terhadap pelaksanaan Renja-KL, meliputi pelaksanaan program dan kegiatan, serta jenis belanja.
- d. Hal yang sama untuk Gubernur terhadap pelaksanaan dekon dan TP, serta Bupati/Walikota untuk pelaksanaan TP.
- e. Dilakukan melalui pemantauan dan pengawasan.

Evaluasi bertujuan untuk melihat tingkat keberhasilan pengelolaan kegiatan, melalui kajian terhadap manajemen dan output pelaksanaannya serta permasalahan yang dihadapi, untuk selanjutnya menjadi bahan evaluasi kinerja program dan kegiatan selanjutnya. Bentuk evaluasi berupa pengkajian terhadap manajemen dan output pelaksanaannya serta permasalahan yang dihadapi, dimaksudkan :

- a. Memberikan kesimpulan dalam bentuk umpan balik sehingga dapat terus mengarahkan pencapaian visi/misi/sasaran yang telah ditetapkan.
- b. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan antara yang terjadi dengan yang direncanakan, serta mengaitkannya dgn kondisi lingkungan yg ada.

- c. Arah evaluasi bukan pada apakah informasi yang disediakan benar atau salah, tetapi lebih diarahkan pada perbaikan yang diperlukan atas implementasi kebijakan/program/kegiatan.

Evaluasi memberikan informasi mengenai :

- a. Benar atau tidaknya strategi yang dipakai.
- b. Ketepatan cara operasi yang dipilih.
- c. Pemilihan cara pembelajaran yang lebih baik.
- d. Pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan rutin sedang berjalan dan internal, serta pengawasan dipergunakan untuk mengumpulkan informasi terhadap keluaran/hasil dan indikator yang dipergunakan untuk mengukur kinerja program.
- e. Pelaksanaan evaluasi dilaksanakan secara periodik dan berkala, dapat bersifat internal dan eksternal atau partisipatif, sebagai umpan balik periodik kepada pemangku kepentingan utama.

Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Pemantauan bertujuan untuk mengamati/mengetahui perkembangan kemajuan,

identifikasi dan permasalahan serta antisipasi/upaya pemecahannya.

Sedangkan maksudnya, adalah :

- a. Mendapatkan informasi perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan secara terus menerus mengenai pencapaian indikator kinerja dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan.
 - b. Melakukan identifikasi masalah agar tindakan korektif dapat dilakukan sedini mungkin.
 - c. Mendukung upaya penyempurnaan perencanaan berikutnya melalui hasil pemantauan.
- ✓ Pelaksana: masing-masing Pengelola Kegiatan/Satker di daerah serta komponen pembina/penanggungjawab kegiatan pusat, yang hasilnya menjadi input bagi perumusan kebijakan selanjutnya.
 - ✓ Lingkup: aspek perencanaan, penyaluran/pencairan dana, pelaksanaan, dan pelaporan.
 - ✓ Bentuk: Rapat Berkala, Rapat adhock, Pelaporan, dan kunjungan lapangan.
 - ✓ Dilakukan terhadap pelaksanaan Renja-KL, dengan fokus pelaksanaan program dan kegiatan.
 - ✓ Daerah: Gubernur dan Ka. SKPD Provinsi melakukan pemantauan pelaksanaan Dekon dan TP; Bupati/Walikota dan Ka. SKPD Kabupaten/Kota melakukan pemantauan pelaksanaan TP, sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

✓ Komponen pemantuan meliputi: (1) perkembangan realisasi penyerapan dana, (2) realisasi pencapaian target keluaran (*output*), dan (3) kendala yang dihadapi dan tindak lanjut.

✓ Bentuk produk (akhir) laporan triwulan.

Fokus PP 39 tahun 2006 yaitu yang merupakan pengendalian dan evaluasi untuk kegiatan Pemerintah Pusat, yang merupakan dana Kementerian/Lembaga (pusat), dekonsentrasi (provinsi), dan tugas Pembantuan (kabupaten/kota), jadi tidak memfokuskan pada kegiatan daerah yang dibiayai dana desentralisasi . Adapun pengendalian dan evaluasi menurut UU No. 25/2004 Tentang SPPN, Pasal 28:

- a. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing Kementrian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- b. Menteri/Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Kementrian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Selanjutnya Pasal 29 UU No 25/2004 Tentang SPPN:

- a. Pimpinan Kementrian/ Lembaga melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Kementerian/ Lembaga periode sebelumnya;

- b. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode sebelumnya;
- c. Menteri/ Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan Kementerian/ Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- d. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan Nasional/ Daerah untuk periode berikutnya.

Latar belakang perumusan kebijakan di bidang penguatan akuntabilitas kinerja, antara lain dengan alasan karena: sudah cukup lama belum ada revisi pedoman tentang penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perkembangan administrasi keuangan sangat terkait dengan manajemen kinerja (perkembangan sudah cukup banyak), dan penguatan akuntabilitas kinerja melalui kontrak kinerja perlu diperkuat pedomannya. Perencanaan dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja, antara lain: kualitas birokrasi, pelayanan publik, Indeks Daya Saing Global, Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Sumber Daya Manusia Aparatur (Kompetensi, Profesionalitas dan Netralitas) dan Akuntabilitas Kinerja. Tujuan reformasi manajemen kinerja melalui implementasi SAKIP yaitu meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi. Adapun tujuan/sasaran reformasi di bidang perencanaan & penganggaran adalah untuk

mewujudkan upaya meletakkan landasan bagi sistem perencanaan dan penganggaran yg mampu menjamin arah pembangunan secara berkesinambungan dan memiliki akuntabilitas kinerja yang terukur.

5. Pengawasan Fungsional

Untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah, dalam hal ini pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agar berjalan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, maka diperlukan adanya fungsi pengawasan karena pengawasan itu sendiri adalah suatu usaha untuk menjamin adanya penyelenggaraan tugas pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna. Selain itu juga fungsi pengawasan ditujukan untuk menjamin keamanan atas kekayaan dan keuangan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Untuk tercapainya sasaran tersebut maka perlu adanya usaha untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan keuangan daerah.

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai wujud tanggung jawab, mampu memenuhi kewajiban keuangan, kejujuran, hasil guna dan pengendalian (Mardiasmo,2002:14). Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah melakukan pengawasan fungsional terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanjanya sendiri.

Pengawasan fungsional sebagai bentuk kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan suatu pekerjaan atau kegiatan dilakukan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan guna menanggulangi kemungkinan terjadinya penyimpangan pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta peningkatan pendayagunaan aparatur negara dalam memberantas adanya unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Pengertian pengawasan fungsional pemerintah daerah menurut Hanif Nurcholis (2007:312) menyatakan bahwa Pengawasan Fungsional pemerintah daerah adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah yang dilakukan secara fungsional baik dilakukan oleh departemen sektoral maupun departemen yang menyelenggarakan pemerintahan umum (departemen dalam negeri).

Menurut Baldrik Siregar dan Bonni Siregar (2000:351) mengemukakan Aparat Pengawasan Fungsional dibagi menjadi 3 yaitu

- a. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- b. Inspektorat Jenderal Departemen
- c. Inspektorat Wilayah

Menurut A. Ali Mashduqi, SST, Ak, CA (2015), Pengawasan Fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang diadakan khusus untuk membantu pimpinan dalam menjalankan fungsi pengawasan di lingkungan organisasi yang menjadi tanggung jawabnya. Pengawasan fungsional terdiri dari Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); Inspektorat Jenderal Departemen, Aparat Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen/instansi pemerintah lainnya; dan Inspektorat Wilayah Provinsi; dan Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kota Madya.

Menurut Sumarsono (2010;253) pengertian pengawasan fungsional adalah Pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional baik yang berasal dari lingkungan internal pemerintah maupun yang berasal dari lingkungan eksternal pemerintah. Pengawasan fungsional adalah Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga/ badan/ Inti yang mempunyai tugas melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian, penilaian, monitoring, dan evaluasi.

Dari pengertian-pengertian yang diuraikan diatas mengenai pengawasan maka dapat disimpulkan pengawasan merupakan suatu kegiatan yang harus dilaksanakan oleh pimpinan secara terus menerus atau berkala dalam rangka melakukan pemantauan, pemeriksaan, penilaian dan perbaikan agar bawahan dapat bekerja secara efektif, efisien dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan pendapat di atas untuk mendapatkan hasil yang optimal dari pelaksanaan pengawasan ini dan agar dapat berjalan dengan baik maka harus dilakukan dengan teknik yang benar pula. Adapun teknik yang dapat dilakukan yaitu meliputi: pemantauan, pemeriksaan, penilaian dan perbaikan

a. Pemantauan

Pemantauan dilakukan secara langsung yaitu dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk dapat mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan pelaksanaan suatu kegiatan. Hal ini dapat dilakukan secara berkala maupun sewaktu-waktu apabila di perlukan. Agar

pemantauan yang dilaksanakan berjalan dengan tepat, maka perlu dilakukan kegiatan menyusun petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis atau dapat memanfaatkan hasil-hasil pengawasan fungsional maupun pengawasan masyarakat.

b. Pemeriksaan

Pemeriksaan merupakan rangkaian tindakan untuk mencari dan mengumpulkan fakta yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan suatu kegiatan. Kegiatan pemeriksaan adalah salah satu bagian dari pengawasan. Pemeriksaan dapat dilakukan melalui laporan kerja yang dibuat oleh pegawai maupun pemimpin langsung meninjau ke lapangan untuk melihat apakah laporan sesuai dengan kondisi lapangan. Antara pengawasan dan pemeriksaan merupakan satu mata rantai fungsi manajemen dimana pemeriksaan merupakan pemantauan yang jeli dan diperlukan didalam melaksanakan tugas pengawasan.

c. Penilaian

Dalam tahap ini kegiatan yang dilakukan yaitu melakukan pengukuran terhadap realita yang telah terjadi sebagai hasil kerja dari tugas yang telah diselesaikan. Kemudian penilaian dilaksanakan dengan cara membandingkan antara kekayaan atau hasil dari pekerjaan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Penelitian dapat dilakukan pula dengan mencari factor-faktor yang dapat mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan suatu rencana. Hasil penelitian, selain dapat digunakan

sebagai *feedback* atau umpan balik bagi penyempurnaan rencana atau pekerjaan selanjutnya dapat juga dijadikan dasar pertimbangan untuk menentukan tindak lanjut yang harus dilaksanakan secara tepat.

d. Perbaikan

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini yaitu mencoba mencari jalan keluar untuk mengambil langkah-langkah tindakan koreksi terhadap penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi. Upaya menetapkan standar-standar dan mengukur performa. Tidak ada artinya tanpa adanya tindakan perbaikan positif. Tindakan perbaikan meliputi suatu proses pengambilan keputusan. Dari hasil penilaian kemudian dipilih alternatif tindakan yang akan dipilih untuk diimplementasikan guna melaksanakan perbaikan. Tindakan perbaikan berguna untuk mengetahui apakah performa sudah kembali standar yang telah ditetapkan dan hal ini dapat dilihat melalui ciri-ciri *feedback* dari sistem pengawasan yang ada.

Menurut Mulyadi (2002;40) pengertian pemeriksaan adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai pernyataan tentang kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Sedangkan menurut Agoes (2004) mendefinisikan pemeriksaan (*Auditing*) sebagai suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang *independent* terhadap laporan keuangan yang disusun oleh manajemen.

Pemeriksaan dilakukan dalam rangka pengendalian suatu kegiatan yang dijalankan oleh suatu unit usaha tertentu. Oleh karena itu pemeriksaan merupakan bagian dari pengawasan sedangkan pengawasan merupakan bagian dari pengendalian. Suatu pengawasan akan menghasilkan temuan-temuan yang memerlukan tindak lanjut. Apabila keseluruhan tindak lanjut itu dilaksanakan, maka keseluruhan pekerjaan itu merupakan proses pengendalian, akan tetapi bilamana tindak lanjut tidak dilaksanakan maka tetap dikatakan pengawasan.

Pengawasan fungsional adalah menjamin terlaksananya penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yang bersih, berwibawa dan pengelolaan keuangan secara ekonomis, efisien, dan efektif serta mencegah adanya penyimpangan dalam pelaksanaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan pengawasan fungsional dapat digolongkan ke dalam tiga bentuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan pengawasan tahunan
- b. Kegiatan pengawasan khusus
- c. Kegiatan pengawasan hal-hal tertentu

Kegiatan pengawasan tahunan didasarkan atas program kerja pengawasan tahunan (PKPT). Dalam pelaksanaannya PKPT dikoordinasikan oleh BPKP yaitu dengan jalan :

- a. Menerbitkan nama pengawas aparat pengawasan fungsional pemerintah.
- b. Mengeluarkan pedoman pemeriksaan.

c. Memantau pelaksanaan PKPT dan menyelenggarakan rapat koordinasi.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan rencana dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *clean government*, pengawasan juga diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta bersih dan bebas dari praktik-praktik KKN. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan tersebut dapat dilakukan melalui pengawasan melekat, pengawasan masyarakat, dan pengawasan fungsional (Cahyat, 2004).

6. Efektivitas Pengendalian Anggaran

Pengertian Efektivitas secara umum adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya sesuatu efek atau akibat yang dikehendaki. Kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki, maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendakinya, kemudian efektivitas juga merupakan kemampuan untuk memilih tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang tepat untuk mencapai tujuan dengan tepat dan cepat, dengan pencapaian berhasil dan ataupun gagal, dengan kata lain seluruh kepentingan yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu harus atau perlu adanya suatu pelayanan. Efektivitas Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam

kehidupan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan atau pun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, utilitas, dan lainnya. Maka dengan pengertian-pengertian diatas dapat dipahami bahwa efektivitas secara umum adalah sebuah pelayanan publik dapat dikatakan efektif jika pelaksanaan pelayanan dapat dilakukan dengan tepat, cepat dan benar.

Kurniawan (2005:109) “Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya”. Jadi dalam melaksanakan tugas dan fungsi tidak selalu mendahulukan unsur ketegangan di dalam pelaksanaannya. Sumaryadi (2005: 105) juga berpendapat “Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan,sejauh mana seorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan”. Dapat diartikan, apabila sesuatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan yang di rencanakan, dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga dan yang lain.

Menurut pendapat Mahmudi dalam bukunya Manajemen Kinerja Sektor Publik mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan”Mahmudi, 2005:92).

Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*. Hubungan Efektivitas Sumber: Mahmudi, (2005:92). Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka efektivitas adalah menggambarkan seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil guna daripada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauhmana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai targetnya. Hal ini berarti, bahwa pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah semata-mata hasil atau tujuan yang dikehendaki. Pandangan yang sama menurut pendapat Peter F. Seorang manajer efektif adalah satu yang memilih kebenaran untuk melaksanakan” (Moenir, 2006:166).

Memperhatikan pendapat para ahli di atas, bahwa konsep efektivitas merupakan suatu konsep yang bersifat multi dimensional, artinya dalam mendefinisikan efektivitas berbeda-beda sesuai OUTCOME Efektivitas = OUTPUT dengan dasar ilmu yang dimiliki walaupun tujuan akhir dari efektivitas adalah pencapaian tujuan. Kata efektif sering dicampur adukkan dengan kata efisien walaupun artinya tidak sama, sesuatu yang dilakukan secara efisien belum tentu efektif.

Menurut pendapat Zahnd dalam bukunya Perancangan Kota Secara Terpadu mendefinisikan efektivitas dan efisiensi, sebagai berikut: “Efektivitas yaitu berfokus pada akibatnya, pengaruhnya atau efeknya,

sedangkan efisiensi berarti tepat atau sesuai untuk mengerjakan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya”. (Zahnd, 2006:200-2001).

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa efektivitas lebih memfokuskan pada akibat atau pengaruh sedangkan efisiensi menekankan pada ketepatan mengenai sumber daya, yaitu mencakup anggaran, waktu, tenaga, alat dan cara supaya dalam pelaksanaannya tepat waktu. Lebih lanjut menurut Agung Kurniawan dalam bukunya Transformasi Pelayanan Publik mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya”. (Kurniawan, 2005:109). Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka secara singkat pengertian daripada efisiensi dan efektivitas adalah, efisiensi berarti melakukan atau mengerjakan sesuatu secara benar, “*doing things right*”, sedangkan efektivitas melakukan atau mengerjakan sesuatu tepat pada sasaran “*doing the right things*”. Tingkat efektivitas itu sendiri dapat ditentukan oleh terintegrasinya sasaran dan kegiatan organisasi secara menyeluruh, kemampuan adaptasi dari organisasi terhadap perubahan lingkungannya. Mengacu pada penjelasan diatas, maka untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif perlu adanya harmonisasi kemampuan sumberdaya dengan menggunakan sarana yang lain sehingga sasaran yang akan dicapai menjadi jelas. Pencapaian sasaran tersebut dapat dikatakan efektif apabila adanya

keharmonisan. Setiap pekerjaan pegawai dalam organisasi sangat sangat menentukan bagi pencapaian hasil kegiatan seperti yang telah direncanakan terlebih dahulu. Untuk itu faktor keefektifannya banyak mempengaruhi kepada kemampuan aparatur dan organisasi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Tingkat pencapaian tujuan aparatur dalam suatu organisasi dikatakan efektif apabila pencapaian itu sesuai dengan tujuan organisasi dan memberikan hasil yang bermanfaat.

Pengendalian anggaran pada prinsipnya dapat memperhatikan suatu kegiatan dan selalu mengawasi aktivitas sehari-hari terhadap pengelolaan keuangan hubungannya dengan penggunaan anggaran. Kegiatan pengendalian sangat erat hubungannya dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya, oleh karena itu kegiatan pengendalian ini dapat dilihat apakah tujuan kegiatan yang telah direncanakan dapat dicapai dalam pelaksanaan riil. Perencanaan dan pengendalian anggaran merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan dengan pelaksanaan kegiatan. Pada pelaksanaan yang memerlukan usaha yang sungguh-sungguh dan sangat tergantung pada sistem pengendalian yang efektif dan sistem informasi yang digunakan. Agar dapat melaksanakan pengendalian yang efektif, maka seorang pimpinan atau pelaksana tugas memerlukan informasi rencana dan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan.

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang itu belum dimiliki/dikuasai oleh

Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk dalam keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah. Keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Keuangan daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah. Arti dari keuangan daerah yaitu pengorganisasian dan pengolahan sumber-sumber kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki daerah tersebut, Halim (2001:20).

Sedangkan alat untuk melaksanakan manajemen keuangan daerah yaitu tata usaha daerah yang terdiri dari tata usaha umum dan tata usaha keuangan yang sekarang lebih dikenal dengan akuntansi keuangan daerah. Menurut Noerdiawan (2008), anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimiliki pada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas (*the process of allocating resources to unlimited demands*). Anthony dan Govindarajan (2005) mengemukakan bahwa anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi.

Menurut Noerdiawan (2008) beberapa fungsi anggaran sektor publik dalam manajemen sektor publik adalah :

a. Anggaran sebagai alat perencanaan

Dengan adanya anggaran, organisasi tahu apa yang harus dilakukan dan kearah mana kebijakan akan dibuat.

b. Anggaran sebagai alat pengendalian

Dengan adanya anggaran, organisasi sektor publik dapat menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar (*overspending*) atau adanya penggunaan dana yang tidak semestinya (*miss pending*).

c. Anggaran sebagai alat kebijakan

Melalui anggaran, organisasi sektor publik dapat menentukan arah atas kebijakan tertentu.

d. Anggaran sebagai alat politik

Dalam organisasi sektor publik, komitmen pengelola dalam melaksanakan program-program yang telah dijanjikan dapat dilihat melalui anggaran.

e. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi

Melalui dokumen anggaran yang komprehensif, sebuah bagian, unit kerja, atau departemen yang merupakan sub organisasi dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan juga apa yang akan dilakukan oleh bagian/unit kerja lainnya.

f. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja

Anggaran adalah suatu ukuran yang bisa menjadi patokan apakah suatu bagian/unit kerja telah memenuhi target, baik berupa terlaksananya aktivitas maupun terpenuhinya efisiensi biaya.

g. Anggaran sebagai alat motivasi

Anggaran dapat digunakan sebagai alat komunikasi dengan menjadikan nilai-nilai nominal yang tercantum sebagai target pencapaian. Dengan cacatan, anggaran akan menjadi alat motivasi yang baik jika memenuhi sifat “menantang tetapi masih mungkin untuk dicapai” (*challenging but attainable atau demanding but achievable*). Maksudnya adalah suatu anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi, juga jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah dicapai.

h. Anggaran sebagai alat pengendalian

Partisipasi aparat pemerintah daerah dalam proses penyusunan anggaran pemerintah daerah adalah menunjukkan pada seberapa besar keterlibatan aparat pemerintah daerah yang terlibat dalam proses penganggaran daerah dan diberi kesempatan untuk ambil bagian dalam pengambilan keputusan melalui negosiasi terhadap anggaran. Hal ini sangat penting, karena aparat pemerintah daerah akan merasa produktif dan puas terhadap pekerjaannya sehingga memungkinkan munculnya perasaan berprestasi yang akan meningkatkan kinerjanya.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang fungsi pengawasan dalam pelaksanaan kerja sebuah organisasi untuk mencapai sebuah tujuan banyak dilakukan dan dipublikasikan, antara lain yang dilakukan oleh:

1. Lilik Singgih Purnomo (2016) dalam tesisnya dengan judul pengaruh anggaran berbasis kinerja, pengawasan preventif dan Pengawasan

fungsional terhadap pengendalian anggaran SKPD Kabupaten Grobongan pada hasil pengujiannya menunjukkan adanya pengaruh pengawasan preventif terhadap efektivitas pengendalian anggaran.

2. Hasil penelitian Bayu (2017) bahwa pengawasan preventif berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian anggaran. Hal ini berarti dengan adanya pengawasan preventif, maka akan meningkatkan efektivitas pengendalian anggaran di SKPD Kota Dumai.
3. Penelitian Julio (2014) menemukan bahwa Pengawasan detektif berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengendalian anggaran dengan studi empiris pada SKPD Kabupaten Kampar.
4. Arif Fuadi (2013), dengan penelitian berjudul Pengaruh Pengawasan Preventif dan Pengawasan Detektif terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran pada SKPD kota Bukittinggi, yang mana memberikan hasil penelitian bahwa pengawasan preventif dan pengawasan detektif memiliki pengaruh positif signifikan terhadap efektivitas pengendalian anggaran pada SKPD di kota Bukittinggi.
5. Uci Austin (2012), dengan penelitian berjudul Pengaruh Pengawasan Melekat, Pengawasan Fungsional, Pengawasan Preventif dan Pengawasan Detektif terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran Pemerintah Kota Pekanbaru, dengan hasil penelitian bahwa seluruh variabel independen yang diteliti memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap efektivitas pengendalian anggaran.

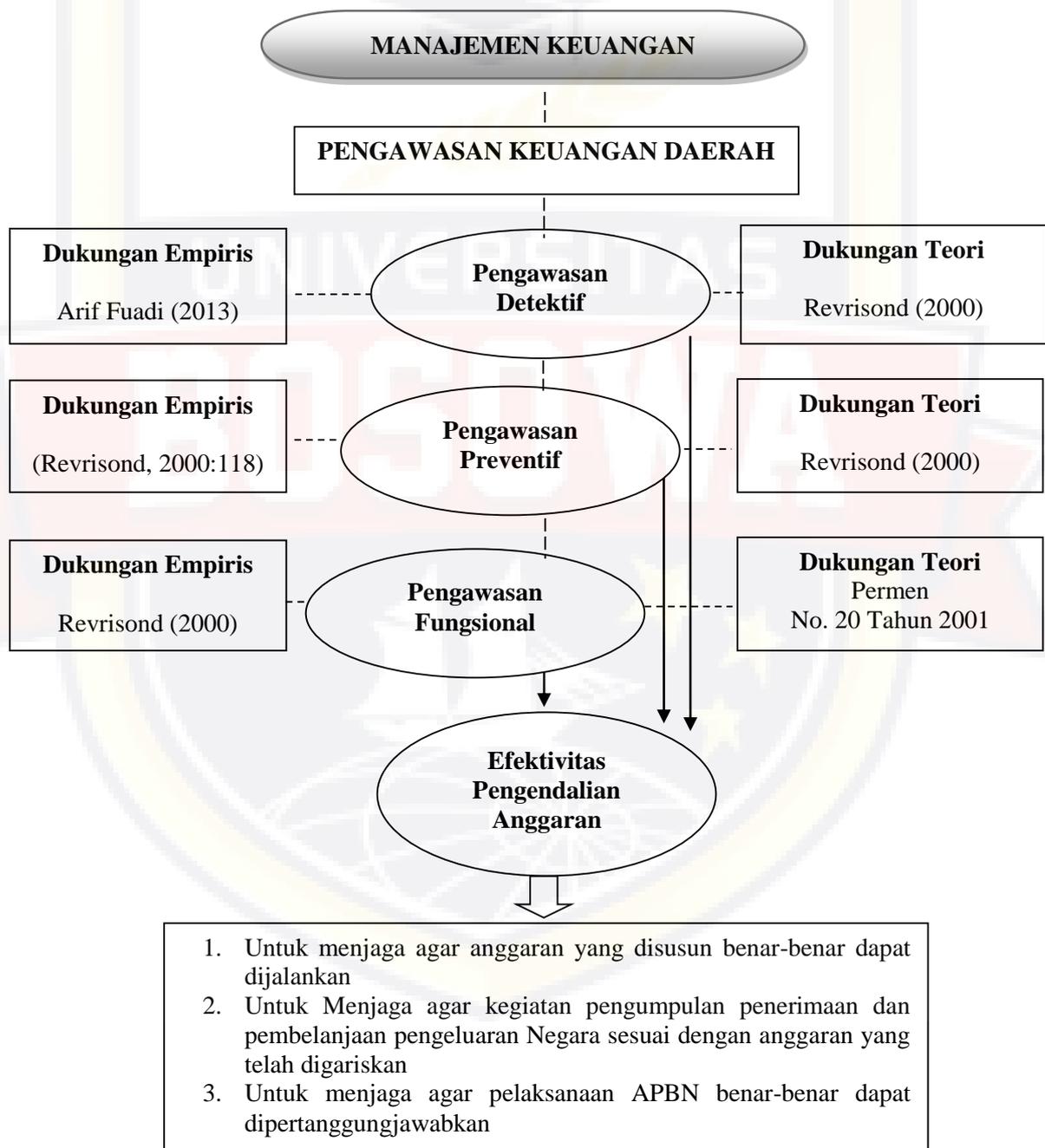
6. Penelitian Azhari, dkk. (2014) menemukan bahwa pengawasan detektif berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengendalian anggaran dengan studi empiris pada SKPD Kabupaten Kuantan Singingi.
7. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti (2010) dengan judul Efektivitas Pengawasan Fungsional Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, dalam penelitian tersebut permasalahan yang diangkat yaitu apakah efektivitas pengawasan fungsional berpengaruh terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.

C. Kerangka Pikir

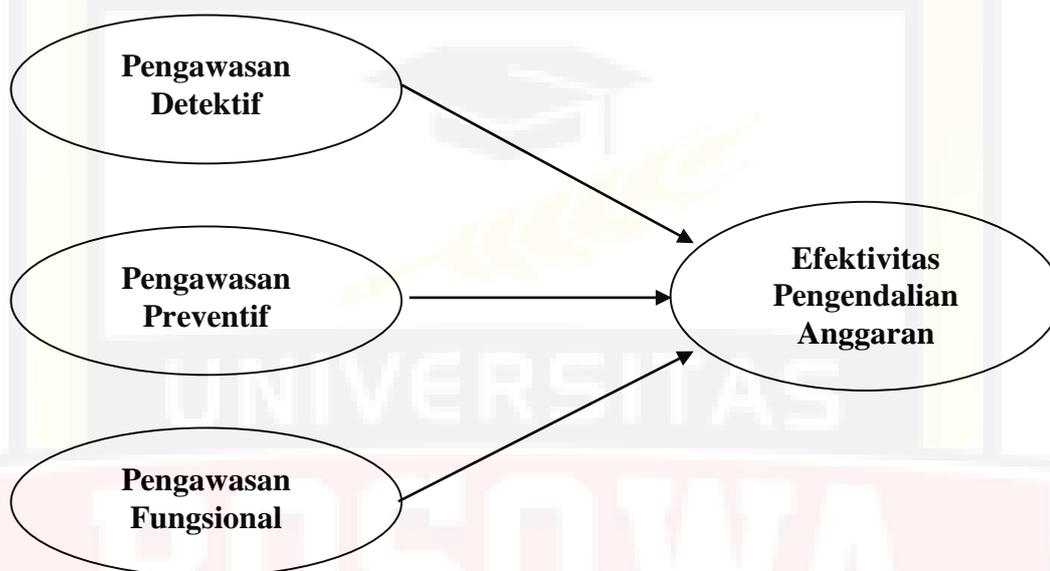
Pengawasan detektif sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen-dokumen laporan pertanggungjawaban bendaharawan untuk mengetahui apakah kegiatan dan pembiayaan yang telah ditentukan itu telah mengikuti kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan serta pengawasan setektif sesungguhnya mencakup aspek pengendalian dan pemeriksaan yang dilakukan pihak atasan terhadap bawahan.

Pengawasan terhadap pencapaian kinerja SKPD secara berkala diperlukan bagi setiap pimpinan SKPD. Hal ini diperlukan agar pimpinan SKPD dapat segera mengambil langkah-langkah sehingga anggaran kegiatan dapat dikendalikan sesuai target kinerja yang telah ditetapkan serta dapat dicapai tepat waktu.

Dalam mencapai efektivitas pengendalian anggaran yang lebih baik diperlukan pengawasan baik secara fungsional maupun preventif serta detektif agar pimpinan SKPD dengan cepat mengetahui sejauh mana suatu kegiatan atau program terlaksana secara efektif dan efisien.



Berdasarkan landasan teori dan rumusan masalah penelitian serta kerangka pikir sebagaimana dijelaskan di atas, maka model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Model Penelitian

D. Hipotesis

1. Hipotesis 1

Pengawasan detektif sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen-dokumen laporan pertanggungjawaban bendaharawan untuk mengetahui apakah kegiatan dan pembiayaan yang telah ditentukan itu telah mengikuti kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan serta pengawasan selektif sesungguhnya mencakup aspek pengendalian dan pemeriksaan yang dilakukan pihak atasan terhadap bawahan. Jadi, pengawasan detektif merupakan salah satu aspek yang

mendukung untuk terlaksananya pengendalian yang efektif. Dengan demikian bahwa pengawasan detektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektifitas pengendalian anggaran. Selanjutnya Revrisond (2000) mengatakan bahwa pengawasan sesungguhnya mencakup aspek pengendalian dan pemeriksaan yang dilakukan pihak atasan terhadap bawahan. Jadi, pengawasan detektif merupakan salah satu aspek yang mendukung untuk terlaksananya pengendalian yang efektif.

Hubungan antara pengawasan detektif dan pengendalian anggaran ini telah dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh Arif Fuadi tahun 2013 yang menemukan bahwa pengawasan detektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektifitas pengendalian anggaran.

Berdasarkan beberapa kajian tersebut maka rumusan hipotesis dalam penelitian ini yaitu :

H_a : Pengawasan detektif diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengendalian anggaran satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

2. Hipotesis 2

Pengawasan preventif sebagaimana yang dijelaskan di atas merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan berlangsung, dan pengawasan ini dapat dijadikan sebagai pencegahan dini terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan terhadap anggaran, dan mencegah tidak tercapainya anggaran sesuai dengan yang telah ditetapkan, sehingga anggaran yang telah ditetapkan dapat diawasi penggunaannya sesuai

dengan peruntungannya, dan tidak terjadi lagi dana-dana yang terbuang, dan tidak terserap secara penuh.

Sedangkan pengertian pengendalian terhadap anggaran adalah proses untuk memastikan bahwa anggaran sampai hal yang spesifik dilaksanakan secara tepat dan efisien. Pengendalian terhadap pelaksanaan anggaran dilakukan dengan tujuan menjamin agar pengumpulan penerimaan negara dan penyaluran pengeluaran-pengeluaran negara, tidak menyimpang dari rencana yang telah digariskan dalam anggaran negara (Revrisond, 2000:118).

Berdasarkan beberapa kajian tersebut maka rumusan hipotesis dalam penelitian ini yaitu :

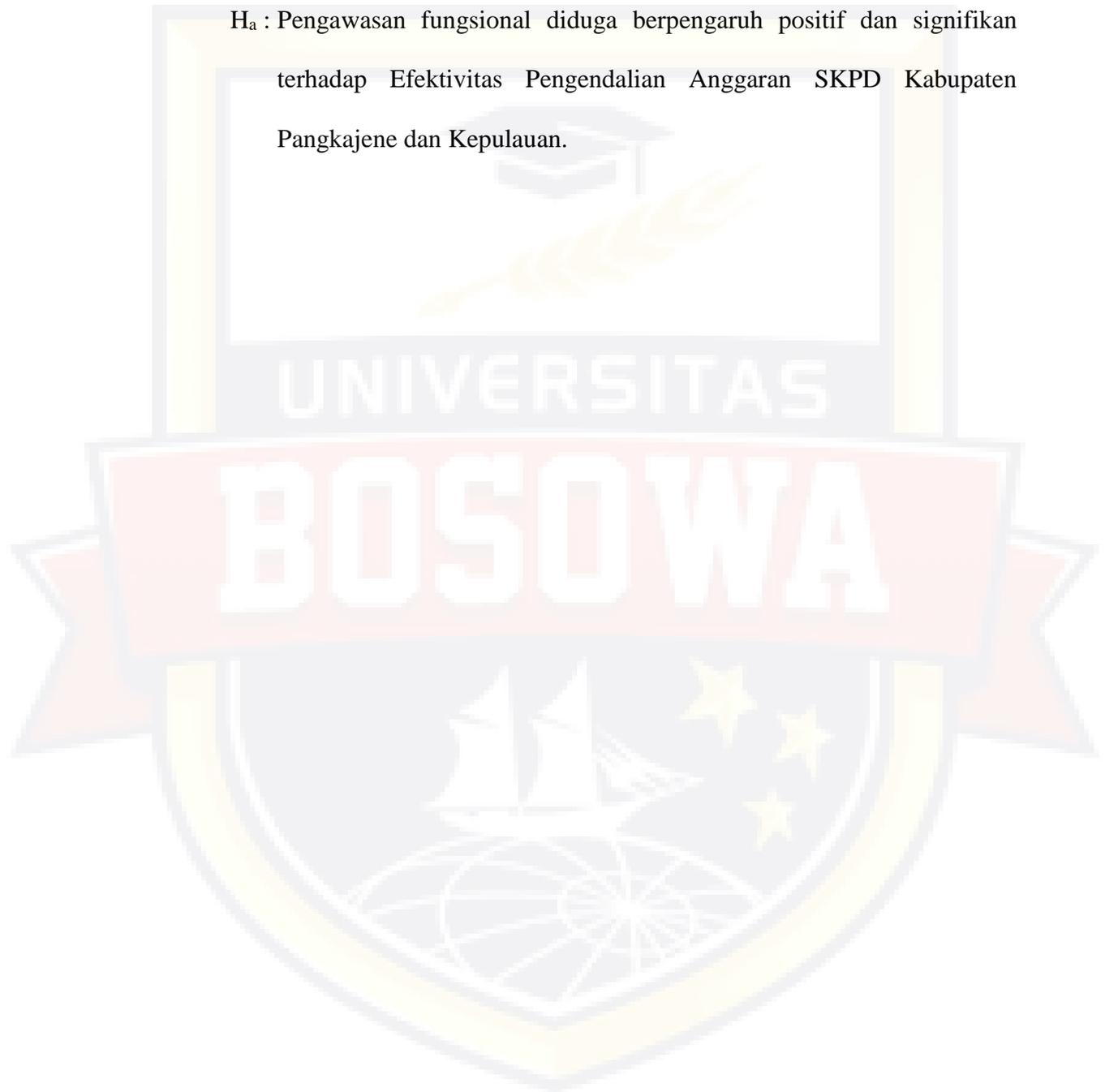
H_a : Pengawasan preventif diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengendalian anggaran satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

3. Hipotesis 3

Pengawasan fungsional berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah mengemukakan bahwa: “Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh Lembaga/Badan/Unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengkajian pengusutan, dan penilaian”.

Berdasarkan beberapa kajian tersebut maka rumusan hipotesis dalam penelitian ini yaitu :

H_a : Pengawasan fungsional diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran SKPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian survey dengan pendekatan kuantitatif yaitu penelitian yang menggunakan sampel dan kuesioner sebagai alat pengumpulan data pokok, yang dilanjutkan dengan uji verifikasi yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Penelitian survey yang dimaksud adalah bersifat menjelaskan hubungan kausal dan pengujian hipotesis. Penelitian survey biasanya dilakukan untuk mengambil suatu generalisasi dari pengamatan yang tidak mendalam, tetapi generalisasi yang dilakukan bisa lebih akurat bila digunakan sampel yang representatif.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Penelitian ini berlangsung dari Februari sampai dengan Maret 2018.

C. Jenis Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini ada dua jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama baik

individu ataupun perseorangan seperti hasil dari wawancara dari narasumber, dan dari hasil pengisian kuesioner yang dilakukan peneliti terhadap responden yang dipilih sebagai sampel. Dalam penelitian ini, digunakan teknik kuesioner dan daftar isian pertanyaan.

2. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari instansi atau lembaga yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dengan penelitian yang dilakukan, sehingga peneliti tinggal mempergunakan. Data sekunder yang dimaksud yaitu perpustakaan, lebih jelasnya meliputi, orang, dokumentasi, monografi, hasil penelitian, makalah dalam seminar, lokakarya, majalah ilmiah, buku-buku, jurnal internet, artikel dan lain sebagainya. Kegunaan data sekunder adalah untuk mempermudah langkah-langkah dalam penelitian.

D. Populasi, Sampel dan Teknik Penentuan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai instansi pemerintahan yang terdaftar dalam satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang merupakan pengelola unit kerja atau pejabat struktural pada Satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Jumlah SKPD di Kabupaten Pangkep adalah 50 SKPD. dari 50 SKPD selanjutnya peneliti akan menentukan 1 orang untuk dijadikan sebagai sampel penelitian, sehingga total sampel adalah 50 orang.

Pengambilan sampel atas responden dilakukan secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* digunakan karena informasi yang akan diambil

berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti. Sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu sehingga dapat mendukung penelitian ini. Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pejabat Struktural pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Memiliki jabatan sebagai pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat penatausahaan keuangan, pejabat perencana dan bendahara pengeluaran pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Tabel 3.1
Distribusi Sampel Penelitian

NO.	Nama SKPD	Jumlah Sampel
1	Dinas Pendidikan	1 Orang
2	Dinas Kesehatan	1 Orang
3	Dinas Pekerjaan Umum	1 Orang
4	Dinas Penataan Ruang	1 Orang
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Orang
6	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	1 Orang
7	Satuan Polisi Pamong Praja	1 Orang
8	Dinas Sosial	1 Orang
9	Dinas Ketenagakerjaan	1 Orang
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Orang
11	Dinas Ketahanan Pangan	1 Orang
12	Dinas Pertanahan	1 Orang
13	Dinas Lingkungan Hidup	1 Orang
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Orang
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1 Orang
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1 Orang
17	Dinas Perhubungan	1 Orang

18	Dinas Komunikasi dan Informatika	1 Orang
19	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	1 Orang
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1 Orang
21	Dinas Pemuda dan Olahraga	1 Orang
22	Dinas Statistik	1 Orang
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1 Orang
24	Dinas Perikanan	1 Orang
25	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1 Orang
26	Dinas Pertanian	1 Orang
27	Dinas Perdagangan	1 Orang
28	Sekretariat Daerah	1 Orang
29	Sekretariat DPRD	1 Orang
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1 Orang
31	Dinas Pemadam Kebakaran	1 Orang
32	Kecamatan Pangkajene	1 Orang
33	Kecamatan Minasate'ne	1 Orang
34	Kecamatan Balocci	1 Orang
35	Kecamatan Tondong Tallasa	1 Orang
36	Kecamatan Bungoro	1 Orang
37	Kecamatan Labakkang	1 Orang
38	Kecamatan Ma'rang	1 Orang
39	Kecamatan Segeri	1 Orang
40	Kecamatan Mandalle	1 Orang
41	Kecamatan Liukang Tupabbiring	1 Orang
42	Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara	1 Orang
43	Kecamatan Liukang Tangaya	1 Orang
44	Kecamatan Liukang Kalmas	1 Orang
45	Inspektorat Daerah	1 Orang
46	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Orang
47	Badan Pengelola Keuangan Daerah	1 Orang
48	Badan Pendapatan Daerah	1 Orang
49	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	1 Orang
50	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	1 Orang
JUMLAH SAMPEL		50 Orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data tersebut, diperlukan dalam penelitian ini dengan menggunakan cara :

1. Penelitian Lapangan

Untuk memperoleh data primer yang merupakan data langsung yang diperoleh dari lokasi penelitian digunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Kuesioner yaitu daftar pernyataan terstruktur yang ditujukan kepada pegawai yang ada di lingkup pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- b. Wawancara untuk melengkapi kuesioner, baik kepada para pegawai maupun pihak lain yang berhubungan dengan data yang diperlukan.
- c. Observasi dilakukan kepada setiap bidang guna mengamati secara dekat mengenai pengawasan detektif, pengawasan preventif dan pengawasan fungsional terhadap efektivitas pengendalian anggaran.

2. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan diperlukan untuk mendapatkan data sekunder untuk melengkapi data primer. Data sekunder diperoleh dari penelaahan kepustakaan yang berupa dasar-dasar teoritis, hasil penelitian terdahulu, dan bahan-bahan yang mendukung yang relevan dengan penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Arikunto (2006: 236) menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan analisis data adalah pengolahan data yang diperoleh dengan menggunakan rumus-rumus atau aturan-aturan yang ada sesuai dengan pendekatan penelitian atau desain yang diambil. Terkait dengan hal itu maka diperlukan adanya tehnik analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Analisis Statistik Deskriptif

Teknik analisis statistik deskriptif yaitu teknik analisis statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2013: 169). Analisis deskriptif dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran penyebaran hasil penelitian masing-masing variabel secara kategorikal.

2. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda menurut Sugiyono (2012) digunakan oleh peneliti bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Analisis regresi berganda diolah dengan melalui program statistik SPSS 24 *for windows*. Dengan menggunakan regresi akan diperoleh nilai koefisien regresi yang digunakan untuk menuliskan persamaan regresinya.

Dari persamaan regresi tersebut akan diketahui pengaruh dari variabel bebas (*independent variable*) terhadap variabel terikatnya (*dependent variable*).

Dengan teori sebagai berikut :

$$\mathbf{EFA = a + B1PD + B2PP + B3PF + e}$$

Keterangan :

EFA	=	Variabel Efektivitas Pengendalian Anggaran
a	=	Konstanta
B1	=	Koefisien Regresi Variabel Pengendalian Detektif
B2	=	Koefisien Regresi Variabel Pengawasan Preventif
B3	=	Koefisien Regresi Variabel Pengawasan Fungsional
PD	=	Variabel Pengawasan Detektif
PP	=	Variabel Pengawasan Preventif
PF	=	Variabel Pengawasan Fungsional
e	=	Variabel Lain Diluar Penelitian/kesalahan pengganggu

Namun sebelum dilakukan analisis regresi linear berganda, maka terlebih dahulu dilakukan pengujian instrument penelitian maupun data penelitian sebagai syarat utama regresi yang dapat dijelaskan sebagai berikut ini :

a. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Agar instrumen yang dipakai dalam penelitian ini dapat berfungsi dengan baik sebagaimana yang diharapkan, maka instrumen tersebut perlu diuji validitas dan reliabilitasnya.

1. Uji Validitas Instrumen

Sebelum instrumen penelitian digunakan untuk mengumpulkan data perlu dilakukan pengujian validitas. Hal ini digunakan untuk mendapatkan data yang valid dari instrumen yang valid. Menurut Sugiyono (2012:121) “hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan

anantara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti”. Pengujian instrumen dalam penelitian ini dilakukan dengan korelasi bivariate antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk.

Ghozali (2013) menyatakan Uji validitas dilakukan dengan cara melakukan korelasi bivariate antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. Teknik pengujiannya menggunakan teknik korelasi *product moment* dan *pearson* dengan menggunakan tingkat signifikansi 5%, untuk mengetahui keeratan pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Caranya dengan mengkorelasikan antara skor item pertanyaan dengan skor total dengan menggunakan bantuan melalui paket program SPSS 24. Dengan kriteria probabilitas kurang dari 0,05.

2. Uji Reliabilitas Instrumen

Menurut Sugiyono (2012:121) “instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama.” Setelah instrumen di uji validitasnya maka langkah selanjutnya yaitu menguji reliabilitas. Adapun menurut Ghozali (2013) pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. *Repeated Measure* atau pengukuran ulang: disini seseorang akan disodori pertanyaan yang sama pada waktu yang berbeda, dan kemudian dilihat apakah ia tetap konsisten dengan jawabannya.

- b. *One Shot* atau pengukuran sekali saja: disini pengukurannya hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau pengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistic *Cronbach Alpha* (α). (Ghozali, 2013)

Dalam penelitian ini akan dilakukan menggunakan pengukuran reliabilitas cara kedua yaitu *One Shot* atau pengukuran sekali saja. Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini dibantu dengan SPSS 24 untuk uji statistik *Cronbach Alpha* (α). Hasil dari uji statistik *Cronbach Alpha* (α) akan menentukan instrument yang digunakan dalam penelitian ini reliabel digunakan atau tidak dengan nilai minimal 0,60.

b. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinearitas

Ghozali (2013) menyatakan Uji Multikolinearitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen), cara mendeteksi terhadap adanya multikolinearitas dalam model regresi adalah sebagai berikut :

- a. Besarnya *variabel inflation factor* / VIF pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinearitas yaitu nilai $VIF < 10$.
- b. Besarnya toleransi pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinearitas yaitu *tolerance* $> 0,10$.

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heterokodesastisitas. Kebanyakan data *cross section* mengandung situasi heterokedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang dan besar), Ghozali (2013).

Uji heterokedastisitas akan dilakukan dengan metode Uji Glejser. Duwi Priyatno (2016) menyatakan *Uji Glejser* yaitu meregresikan absolute residual dengan masing-masing variabel independen. Jika pada uji t nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolute residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi heterokedastisitas.

3. Uji Normalitas

Ghozali, (2013) menyatakan Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid. Model regresi yang baik adalah model yang berdistribusi normal. Uji normalitas dilakukan dengan uji statistic,

dengan cara melihat nilai kurtosis dan skewness dari residual. Metode ini disebut juga uji *kolmogrov smirnov*, adapun kriteria sebagai berikut :

- a. Jika hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka data dinyatakan tidak berdistribusi normal.
- b. Jika hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka data dinyatakan berdistribusi normal.

4. Uji Linearitas

Duwi Priyatno (2016) menyatakan uji linearitas merupakan uji pra syarat yang biasanya dilakukan jika akan melakukan analisis korelasi pearson atau regresi linear. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel secara signifikan mempunyai hubungan yang linear atau tidak.

Pengujian pada SPSS dengan menggunakan *Test for Linearity* dengan pada taraf signifikansi 0,05. Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linear bila signifikansi (*deviation from Linearity*) kurang dari 0,05.

3. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t-test. Menurut Ghozali (2011:98) “uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen”. Adapun kriteria pengujian Uji T adalah sebagai berikut :

- a. Jika tingkat signifikansi $< 0,05$ dan $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$, hal ini berarti bahwa ada pengaruh positif dan signifikan variabel independen secara individual terhadap variabel dependen.
- b. Jika tingkat ditolak dan H_0 diterima, hal ini berarti bahwa tidak ada pengaruh positif dan signifikan variabel independen secara individual terhadap variabel dependen.

G. Defenisi Operasional Variabel Penelitian

1. Pengawasan Detektif

Revrisond (2000:123) mengatakan pengawasan detektif adalah bentuk pengawasan yang dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen-dokumen laporan pertanggungjawaban, yang biasanya dilaksanakan setelah dilakukan suatu kegiatan. Makmur (2011:67) menyatakan Pengawasan detektif adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen-dokumen laporan pertanggungjawaban Bendaharawan. Berdasarkan cara melakukan pengawasan detektif dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a. Pengawasan dari jauh. Pengawasan dilakukan dengan cara meneliti laporan pertanggung jawaban bendahawan, beserta bukti-bukti pendukungnya.
- b. Pengawasan dari dekat. Pengawasan dilakukan di tempat diselenggaranya kegiatan administrasi.

2. Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif sebagaimana yang dijelaskan di atas merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan berlangsung, dan pengawasan ini dapat dijadikan sebagai pencegahan dini terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan terhadap anggaran, dan mencegah tidak tercapainya anggaran sesuai dengan yang telah ditetapkan, sehingga anggaran yang telah ditetapkan dapat diawasi penggunaannya sesuai dengan peruntungannya, dan tidak terjadi lagi dana-dana yang terbuang, dan tidak terserap secara penuh. Sedangkan pengertian pengendalian terhadap anggaran adalah proses untuk memastikan bahwa anggaran sampai hal yang spesifik dilaksanakan secara tepat dan efisien. Pengendalian terhadap pelaksanaan anggaran dilakukan dengan tujuan menjamin agar pengumpulan penerimaan negara dan penyaluran pengeluaran-pengeluaran negara, tidak menyimpang dari rencana yang telah digariskan dalam anggaran negara (Revrisond, 2000:118). pada variabel pengawasan preventif terdapat beberapa kegiatan pengendalian anggaran pada SKPD berupa pelaksanaan monitoring evaluasi, reuiu, pemantauan dan tindak lanjut.

3. Pengawasan Fungsional

Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian, penilaian, monitoring, dan evaluasi (Basuki, 2007: 178). Dalam penelitian ini variabel pengawasan preventif menggunakan

indikator yang dikembangkan oleh Wati (2011) adapun keempat indikator tersebut merupakan fungsi dari pengawasan fungsional yang tersirat dalam keputusan Presiden RI No. 74 Tahun 2001 tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah pasal 1 yaitu pemeriksaan, pengujian, pengusutan, dan penilaian.

4. Efektivitas Pengendalian Anggaran

Efektivitas merupakan ukuran keberhasilan suatu kegiatan atau program yang dikaitkan dengan tujuan yang ditetapkan. Pengendalian merupakan penilaian atas pekerjaan yang dilaksanakan dengan maksud untuk mengadakan tindakan perbaikan bila perlu, agar apa yang direncanakan perusahaan sesuai dengan realisasinya dan akhirnya tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Pengendalian terhadap anggaran adalah proses untuk memastikan bahwa anggaran sampai hal yang spesifik dilaksanakan secara tepat dan efisien. Pengendalian terhadap pelaksanaan anggaran dilakukan dengan tujuan menjamin agar pengumpulan penerimaan negara dan penyaluran pengeluaran-pengeluaran negara, tidak menyimpang dari rencana yang telah digariskan dalam anggaran negara (Revrison, 2000:118).

Tabel 3.2
Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel	Defenisi	Indikator	Pernyataan	Skala Perhitungan
Pengawasan detektif	Revrisond (2000:123) mengatakan pengawasan detektif adalah bentuk pengawasan yang dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen-dokumen laporan pertanggungjawaban, yang biasanya dilaksanakan setelah dilakukan suatu kegiatan	Makmur (2011:67) 1. Pengawasan Dari Jauh 2. Pengawasan Dari Dekat	Realisasi penggunaan anggaran di laporan bendahara sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang ada Penggunaan anggaran sudah sesuai dengan dokumen rencana kerja anggaran Bukti fisik penggunaan anggaran sesuai dengan realisasi di lapangan Bendahara senantiasa menyetorkan pajak dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang direalisasikan Selama ini distribusi anggaran sesuai mata anggaran pengeluaran sesuai waktu yang telah ditetapkan Realisasi anggaran telah berdasarkan kontrak yang berlaku Administrasi kegiatan di lapangan sinkron dengan administrasi bendahara pengeluaran	Skala Likert
Pengawasan Preventif	pengawasan ini dapat dijadikan sebagai pencegahan dini terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan terhadap anggaran, dan mencegah tidak tercapainya anggaran sesuai dengan yang telah ditetapkan, sehingga anggaran yang telah ditetapkan dapat diawasi penggunaannya sesuai dengan peruntungannya, dan tidak terjadi lagi dana-dana yang terbuang, dan tidak terserap secara penuh.	UU No. 25 Tahun 2004 1. Monitoring 2. Evaluasi	Pimpinan dan inspektorat telah melakukan review atas kinerja SKPD Setiap SKPD telah memiliki jenjang pembinaan sumber daya manusia sebagai bagian dari pengawasan Setiap SKPD menjalankan fungsi pengendalian atas pengelolaan system informasi Setiap SKPD menjalankan tugas pengendalian atas asset pemma Sudah terdapat pemisahan fungsi, otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting pada setiap bagian di SKPD SKPD telah melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian SKPD telah melaksanakan dokumentasi yang baik atas system pengendalian intern, transaksi dan kejadian penting SKPD telah menindaklanjuti hasil pemeriksaan dari aparat pengawas internal maupun eksternal	Skala Likert

			Pimpinan SKPD melakukan evaluasi terhadap setiap pelaksanaan kegiatan	
Pengawasan Fungsional	Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian, penilaian, monitoring, dan evaluasi (Basuki, 2007: 178).	Keputusan Presiden RI No. 74 Tahun 2001 tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah pasal 1 yaitu pemeriksaan, pengujian, pengusutan, dan penilaian.	<p>Kegiatan di SKPD telah dikontrol dengan indicator kinerja yang jelas untuk menilai keberhasilan suatu program</p> <p>Kejelasan sasaran anggaran suatu program harus dimengerti oleh semua aparat dan pimpinan di SKPD</p> <p>Indikator kinerja perlu ditetapkan untuk setiap kegiatan atau program pengkajian</p> <p>SKPD telah melakukan analisis keuangan setiap kegiatan atau program selesai dilaksanakan</p> <p>Ada keterkaitan yang erat antara pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan</p> <p>Kegiatan di SKPD telah dikontrol dengan indicator kinerja yang jelas untuk menilai keberhasilan suatu program</p> <p>Kejelasan sasaran anggaran suatu program harus dimengerti oleh semua aparat dan pimpinan di SKPD</p> <p>Indikator kinerja perlu ditetapkan untuk setiap kegiatan atau program pengkajian</p> <p>SKPD telah melakukan analisis keuangan setiap kegiatan atau program selesai dilaksanakan</p> <p>Ada keterkaitan yang erat antara pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan</p> <p>APIP telah melaksanakan pemeriksaan terhadap SKPD dalam kurun waktu satu tahun anggaran</p> <p>BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap entitas pelaporan keuangan SKPD dalam bentuk audit eksternal</p>	Skala Likert
Efektivitas Pengendalian Anggaran	Efektivitas merupakan ukuran keberhasilan suatu kegiatan atau program yang dikaitkan dengan tujuan yang ditetapkan. Pengendalian merupakan penilaian atas pekerjaan yang dilaksanakan dengan maksud untuk mengadakan tindakan perbaikan bila perlu, agar apa yang direncanakan perusahaan sesuai dengan realisasinya	Zahnd (2006:200-201) <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaruh atau efek 2. Ketepatan waktu, tenaga dan biaya 	<p>Setiap bagian dari SKPD sudah diberikan petunjuk tentang teknik perhitungan perkiraan pendapatan dan pengeluaran</p> <p>Setiap SKPD seharusnya mampu merealisasikan anggaran sesuai target yang telah ditetapkan.</p> <p>Setiap bagian dari SKPD memiliki batasan dalam proses penyusunan anggaran</p> <p>Setiap bagian dari SKPD memiliki batasan waktu dalam</p>	Skala Likert

	dan akhirnya tujuan yang diharapkan dapat tercapai.		<p>penyampaian informasi anggaran</p> <p>Setiap bagian dari SKPD sudah memiliki petunjuk tentang waktu yang tepat dalam melepaskan dana</p> <p>Anggaran pada setiap bagian dari SKPD tidak memungkinkan adanya anggaran biaya yang terlalu besar dan tidak efisien</p> <p>Hambatan sumber daya manusia telah diantisipasi dengan baik dengan menempatkan SDM yang tepat dalam menyusun anggaran</p>	
--	---	--	---	--



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (dahulu bernama Pangkajene Kepulauan, biasa disingkat Pangkep) adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibukotanya adalah Pangkajene. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.112,29 km², Asal kata Pangkajene dipercaya berasal dari sungai besar yang membelah kota Pangkep. Pangka berarti cabang dan Je'ne berarti air. Ini mengacu pada sungai yang membelah kota Pangkep yang membentuk cabang. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdiri dari 13 kecamatan, di mana 9 kecamatan terletak pada wilayah daratan, dan 4 kecamatan terletak di wilayah kepulauan. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 4);

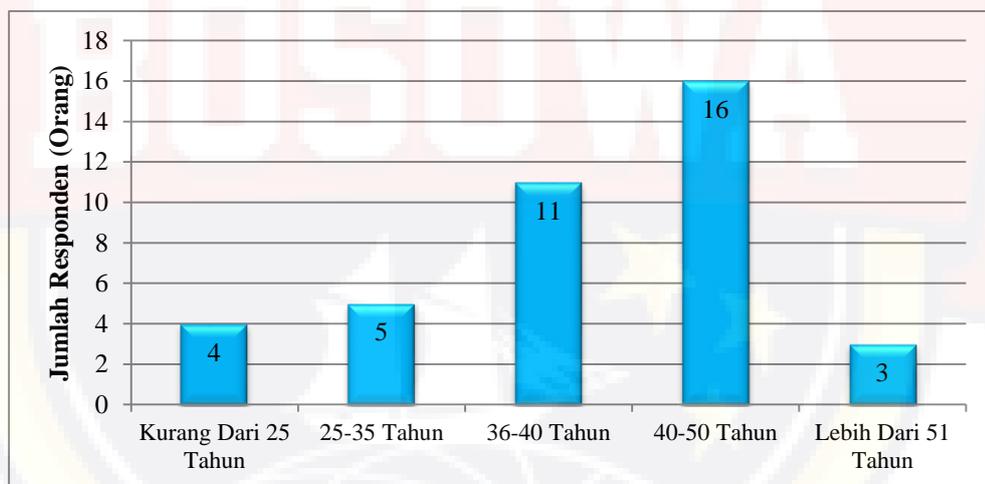
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 1 Nomor 30 bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan;

A. Penjabaran Responden Penelitian

Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 50 orang, Responden tersebut tersebar dalam 50 SKPD yang ada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Hasil analisis frekuensi jawaban responden terhadap karakteristiknya dapat dilihat pada uraian berikut ini :

1. Usia

Umur atau usia adalah satuan waktu yang mengukur waktu keberadaan suatu benda atau makhluk, baik yang hidup maupun yang mati. Hasil Analisis frekuensi terhadap usia responden dapat dilihat dari gambar berikut ini :



Sumber : Data Primer (2018)

Gambar 4.1 Jumlah Responden Berdasarkan Usia

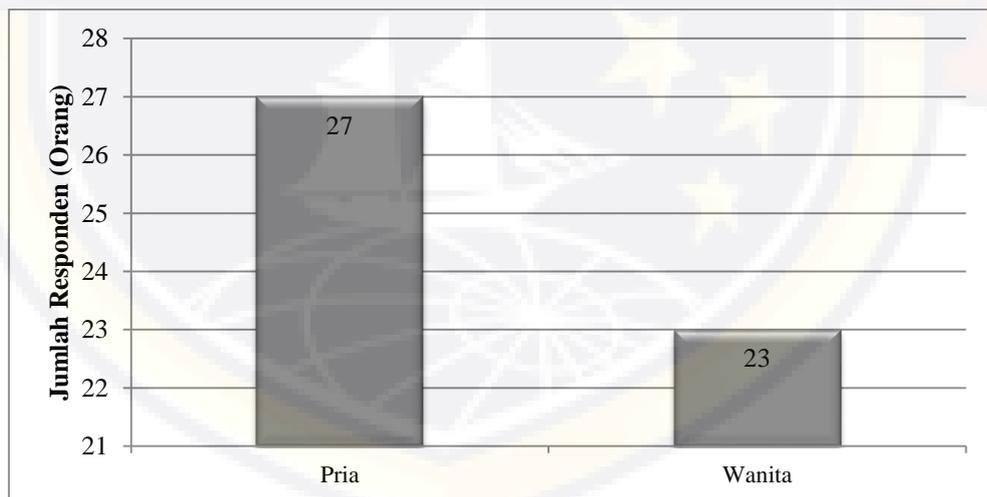
Hasil analisis frekuensi menunjukkan bahwa terdapat 4 orang pegawai yang memiliki umur kurang dari 25 tahun, terdapat 5 orang yang berumur kisaran 25-35 tahun, pada kelompok umur 36-40 tahun terdapat 11 orang, kisaran umur yang paling banyak adalah kelompok umur 40-50 tahun

dengan 16 orang pegawai, responden yang paling sedikit adalah responden yang memiliki umur lebih dari 51 tahun yang hanya terdapat 3 orang.

2. Jenis Kelamin

Menurut Hungu (2007) jenis kelamin (seks) adalah perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara biologis sejak seseorang lahir. Seks berkaitan dengan tubuh laki-laki dan perempuan, dimana laki-laki memproduksi sperma, sementara perempuan menghasilkan sel telur dan secara biologis mampu untuk menstruasi, hamil dan menyusui. Perbedaan biologis dan fungsi biologis laki-laki dan perempuan tidak dapat dipertukarkan diantara keduanya, dan fungsinya tetap dengan laki-laki dan perempuan pada segala ras yang ada di muka bumi.

Hasil Analisis frekuensi terhadap jenis kelamin responden dapat dilihat dari gambar berikut ini :



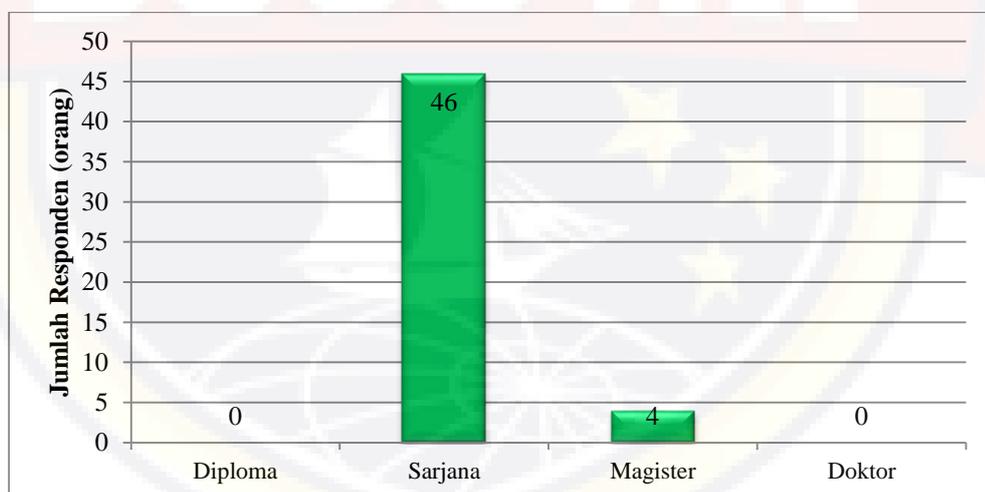
Sumber : Data Primer (2018)

Gambar 4.2 Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari gambar tersebut dapat dinyatakan bahwa terdapat 27 orang yang berjenis kelamin wanita dan hanya 23 orang yang berjenis kelamin pria. Hasil ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan lebih banyak didominasi oleh perempuan.

3. Pendidikan Terakhir

Tingkat pendidikan adalah tahapan pendidikan berkelanjutan, yang sudah ditetapkan oleh lembaga terkait berdasarkan kepada tingkat perkembangan peserta didik, tingkat kesulitan bahan pengajar, dan cara penyajian bahan pengajaran. Indonesia memiliki tingkat pendidikan sekolah seperti pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Hasil Analisis frekuensi terhadap pendidikan terakhir responden dapat dilihat dari gambar berikut ini :



Sumber : Data Primer (2018)

Gambar 4.3 Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

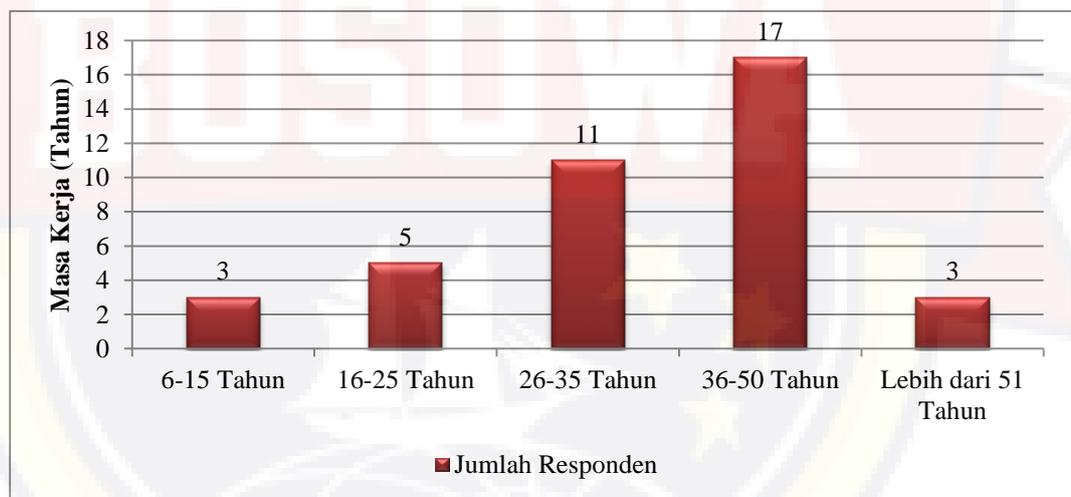
Hasil analisis frekuensi jawaban responden menunjukkan bahwa, dari 50 orang responden terdapat 46 orang yang memiliki tingkat pendidikan

Sarjana dan hanya terdapat 4 orang yang berpendidikan Magister dan tidak ada satupun responden yang memiliki tingkat pendidikan Diploma dan Doktor.

4. Masa Kerja

Masa kerja adalah suatu kurun waktu atau lamanya tenaga kerja itu bekerja disuatu tempat (Tarwaka, 2010). Masa kerja merupakan salah satu alat yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang, dengan melihat masa kerjanya kita dapat mengetahui telah berapa lama seseorang bekerja dan kita dapat menilai sejauh mana pengalamannya (Bachori, 2006).

Hasil Analisis frekuensi terhadap masa kerja responden dapat dilihat dari gambar berikut ini :



Sumber : Data Primer (2018)

Gambar 4.4 Jumlah Responden Berdasarkan Masa Kerja

Hasil analisis frekuensi menunjukkan bahwa terdapat 3 orang yang memiliki masa kerja interval 6-15 tahun, 5 orang memiliki masa kerja 16-25 tahun, 11 orang memiliki masa kerja 26-35 tahun, 17 orang memiliki masa

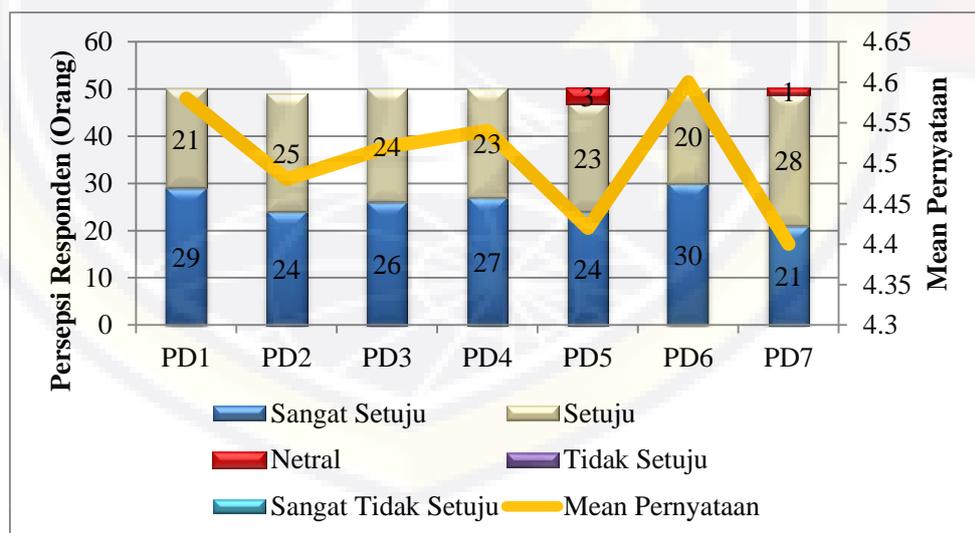
kerja 36-50 tahun dan hanya terdapat 3 orang yang memiliki masa kerja lebih dari 51 tahun.

B. Penjabaran Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat 4 variabel, variabel tersebut selanjutnya dilakukan pengukuran melalui penyebaran kuesioner, hasil penyebaran kuesioner selanjutnya diukur dengan skala likert, kemudian dilakukan analisis data dengan bantuan software SPSS 24, hasil analisis frekuensi terhadap jawaban responden dapat dilihat pada pembahasan berikut :

1. Pengawasan Detektif

Makmur (2011:67) menyatakan Pengawasan detektif adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen-dokumen laporan pertanggungjawaban Bendaharawan. Hasil analisis Frekuensi jawaban responden dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Sumber : Hasil Analisis SPSS 24 (2018)

Gambar 4.5 Distribusi Persepsi Responden Terhadap Variabel Pengawasan Detektif

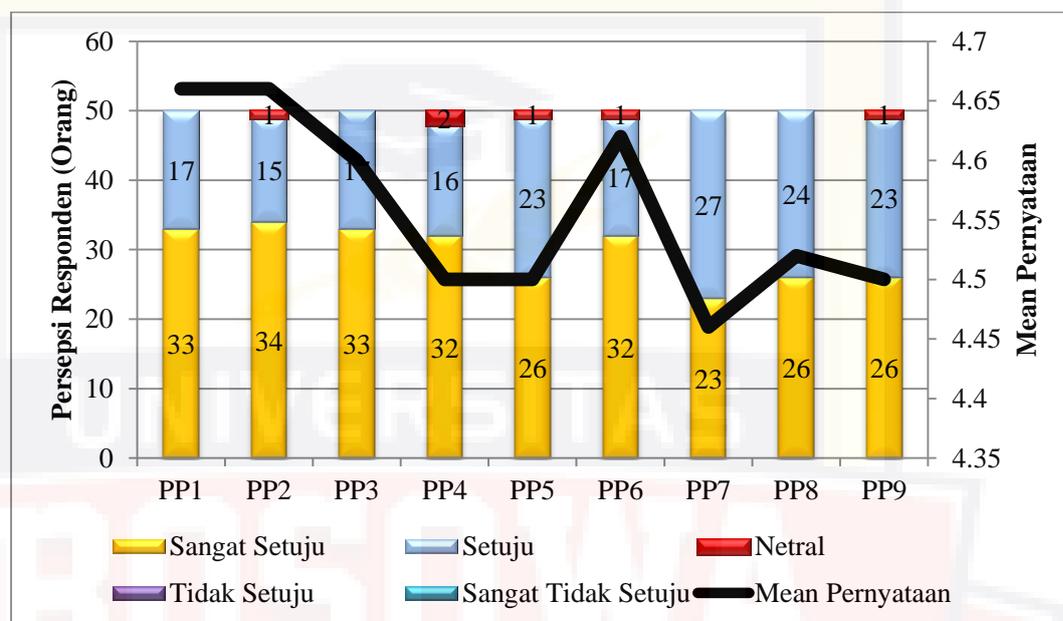
Variabel pengawasan detektif diukur dalam 7 pernyataan. Hasil analisis frekuensi menunjukkan bahwa pada pernyataan PD1 terdapat 29 orang menjawab sangat setuju dan hanya 21 orang yang menjawab setuju. Pernyataan PD2 dijawab sangat setuju oleh 24 orang dan 26 orang menjawab setuju. Pernyataan PD3 dijawab sangat setuju oleh 26 orang dan 24 orang menjawab setuju. Pernyataan PD4 dijawab sangat setuju oleh 27 orang dan 23 orang menjawab setuju. Selanjutnya pada pernyataan PD5 dijawab 24 orang dijawab sangat setuju, 23 orang menjawab setuju dan hanya 3 orang yang menjawab netral. Pada pernyataan PD6 30 orang menjawab sangat setuju dan hanya ada 20 orang yang menjawab setuju. Pernyataan PD7 dijawab sangat setuju oleh 21 orang dan hanya ada 28 orang menjawab setuju namun terdapat 1 orang yang menjawab netral.

Hasil analisis frekuensi menunjukkan bahwa pernyataan PD6 (Realisasi anggaran telah berdasarkan kontrak yang berlaku) merupakan pernyataan yang berpengaruh paling tinggi terhadap variabel pengawasan detektif. Sedangkan pernyataan yang berpengaruh paling kecil yakni pernyataan PD7 (Administrasi kegiatan di lapangan sinkron dengan administrasi bendahara pengeluaran).

2. Pengawasan Preventif

Pengawasan ini dapat dijadikan sebagai pencegahan dini terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan terhadap anggaran, dan mencegah tidak tercapainya anggaran sesuai dengan yang telah ditetapkan, sehingga anggaran yang telah ditetapkan dapat diawasi penggunaannya sesuai dengan

peruntukannya, tidak terjadi lagi dana-dana yang terbuang dan tidak terserap secara penuh. Hasil analisis Frekuensi jawaban responden dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Sumber : Hasil Analisis SPSS 24 (2018)

Gambar 4.6 Distribusi Persepsi Responden Terhadap Variabel Pengawasan Preventif

Pada gambar diatas menunjukkan bahwa pernyataan PP1 dijawab sangat setuju oleh 33 orang dan 17 orang menjawab setuju. Pernyataan PP2 dijawab sangat setuju oleh 34 orang, 15 orang menjawab setuju dan hanya 1 orang yang menjawab netral. Pernyataan PP3 dijawab sangat setuju oleh 33 orang, 17 orang menjawab setuju. 32 orang menjawab sangat setuju pada pernyataan PP4, 16 orang menjawab setuju dan hanya ada 1 orang yang menjawab netral. Pernyataan PP5 dijawab sangat setuju oleh 26 orang, 23 orang menjawab setuju dan hanya terdapat 1 orang yang menjawab netral.

Pernyataan PP6 dijawab sangat setuju oleh 32 orang, 17 orang menjawab setuju dan hanya ada 1 orang yang menjawab netral. Selanjutnya pernyataan PP7 dijawab sangat setuju oleh 23 orang dan hanya 27 orang yang menjawab setuju. Pada pernyataan PP8 dijawab sangat setuju oleh 26 orang dan hanya ada 24 orang yang menjawab setuju. Pernyataan PP9 dijawab sangat setuju oleh 26 orang, 23 orang menjawab setuju dan hanya ada 1 orang yang menjawab netral.

Pernyataan PP1 (Pimpinan dan inspektorat telah melakukan review atas kinerja SKPD) dan pernyataan PP2 (Setiap SKPD telah memiliki jenjang pembinaan sumber daya manusia sebagai bagian dari pengawasan), merupakan pernyataan yang berpengaruh paling tinggi terhadap variabel pengawasan preventif. Sedangkan pernyataan PP7 (SKPD telah melaksanakan dokumentasi yang baik atas system pengendalian intern, transaksi dan kejadian penting) merupakan pernyataan yang paling kecil kontribusinya terhadap variabel pengawasan preventif.

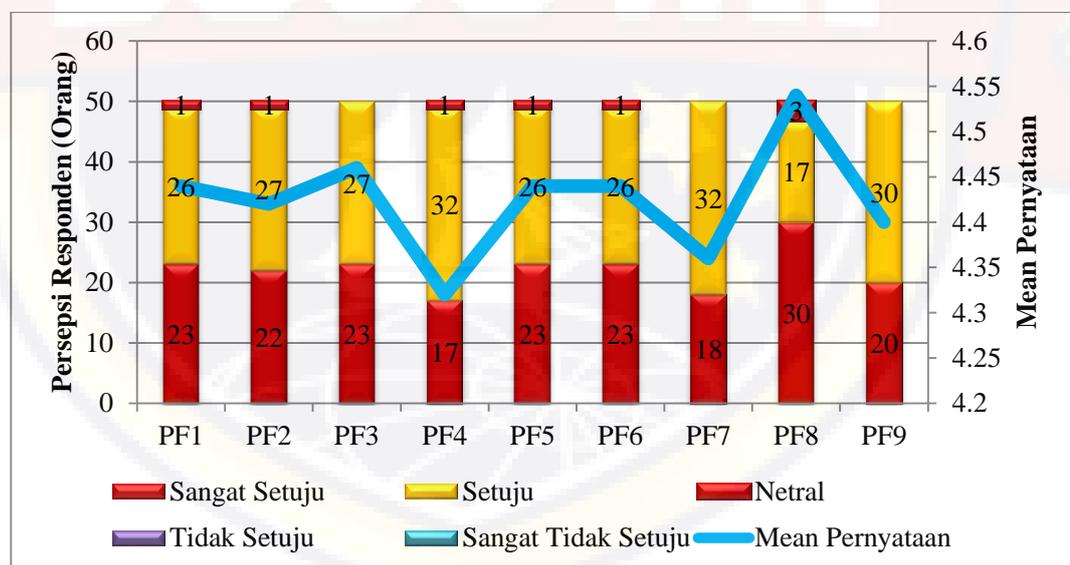
3. Pengawasan Fungsional

Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian, penilaian, monitoring dan evaluasi (Basuki, 2007: 178).

Hasil analisis menunjukkan bahwa pada pernyataan PF1 terdapat 23 orang yang menjawab sangat setuju, 26 orang menjawab setuju dan hanya ada 1 orang yang menjawab netral. Pernyataan PF2 dijawab sangat setuju

oleh 22 orang, 27 orang menjawab setuju dan hanya ada 1 orang menjawab netral. Pada pernyataan PF3 23 orang menjawab sangat setuju dan 27 orang menjawab setuju. Pernyataan PF4 dijawab sangat setuju oleh 17 orang, 32 orang menjawab setuju dan hanya ada 1 orang yang menjawab netral. Pernyataan PF6 dijawab sangat setuju oleh 23 orang dan 26 orang menjawab setuju dan terdapat 1 orang menjawab netral. Pernyataan PF7 dijawab sangat setuju oleh 18 orang dan 32 orang menjawab setuju. Pernyataan PF8 dijawab sangat setuju oleh 30 orang, 17 orang menjawab setuju dan 3 orang menjawab netral. Selanjutnya pernyataan PF9 dijawab sangat setuju oleh 20 orang dan 30 orang menjawab setuju.

Hasil analisis Frekuensi jawaban responden dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Sumber : Hasil Analisis SPSS 24 (2018)

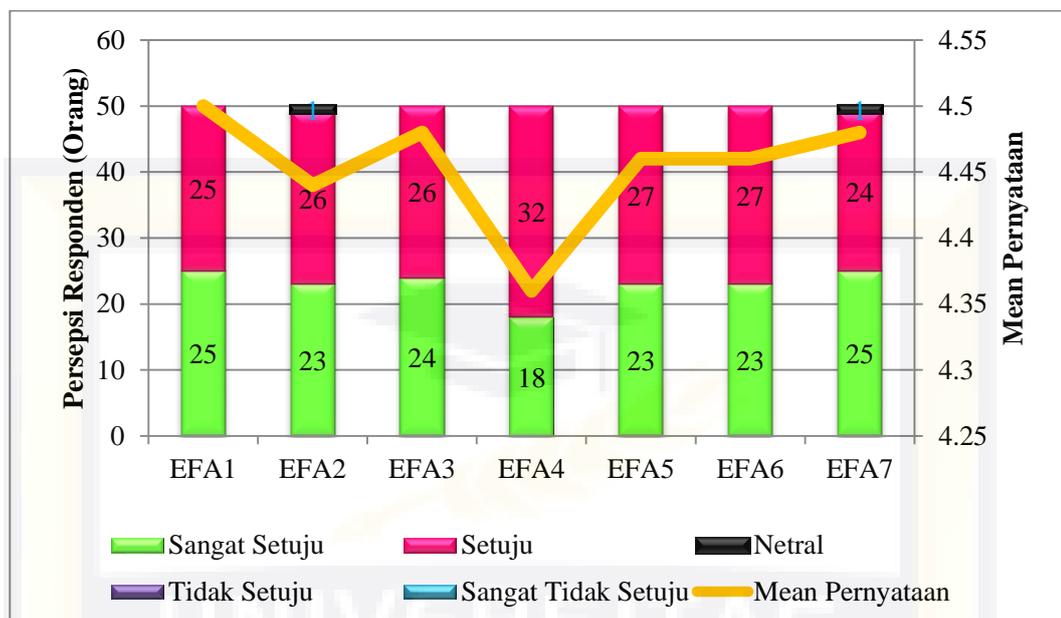
Gambar 4.7 Distribusi Persepsi Responden Terhadap Variabel

Pengawasan Fungsional

Hasil analisis menunjukkan bahwa pernyataan PF8 (APIP telah melaksanakan pemeriksaan terhadap SKPD dalam kurun waktu satu tahun anggaran) merupakan pernyataan yang berpengaruh paling tinggi terhadap pengawasan fungsional. Sedangkan pernyataan PF4 (SKPD telah melakukan analisis keuangan setiap kegiatan atau program selesai dilaksanakan) merupakan pernyataan yang kontribusinya paling kecil terhadap variabel pengawasan fungsional.

4. Efektivitas Pengendalian Anggaran

Efektivitas merupakan ukuran keberhasilan suatu kegiatan atau program yang dikaitkan dengan tujuan yang ditetapkan. Pengendalian merupakan penilaian atas pekerjaan yang dilaksanakan dengan maksud untuk mengadakan tindakan perbaikan bila perlu, agar apa yang direncanakan perusahaan sesuai dengan realisasinya dan akhirnya tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Hasil analisis Frekuensi jawaban responden dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Sumber : Hasil Analisis SPSS 24 (2018)

Gambar 4.7 Distribusi Persepsi Responden Terhadap Variabel Efektivitas Pengendalian Anggaran

Hasil analisis menunjukkan bahwa pernyataan EFA1 dijawab sangat setuju oleh 25 orang dan 25 orang menjawab setuju. Pernyataan EFA2 dijawab sangat setuju oleh 23 orang, 26 orang menjawab setuju dan hanya ada 1 orang yang menjawab netral. Selanjutnya pernyataan pernyataan EFA3 dijawab sangat setuju oleh 24 orang dan 26 orang menjawab setuju. Pernyataan EFA4 dijawab sangat setuju oleh 18 orang dan hanya ada 32 orang menjawab setuju. Pada pernyataan EFA5 23 orang menjawab setuju dan 27 orang menjawab setuju. Pernyataan EFA6 dijawab sangat setuju oleh 23 orang dan hanya 27 orang menjawab setuju. Pernyataan EFA7 dijawab sangat setuju oleh 25 orang, 24 orang menjawab setuju dan hanya ada 1 orang yang menjawab netral.

Dari hasil perhitungan mean pernyataan dapat diketahui bahwa pernyataan EFA1 (Setiap bagian dari SKPD sudah diberikan petunjuk tentang teknik perhitungan perkiraan pendapatan dan pengeluaran) merupakan pernyataan yang berpengaruh paling tinggi terhadap variabel efektivitas pengendalian anggaran, sedangkan pernyataan EFA4 (Setiap bagian dari SKPD memiliki batasan waktu dalam penyampaian informasi anggaran) merupakan pernyataan yang pengaruhnya paling kecil terhadap variabel efektivitas pengendalian anggaran.

C. Pengujian Kualitas Instrumen

Instrumen penelitian memegang peran penting dalam penelitian kuantitatif karena kualitas data yang digunakan dalam banyak hal ditentukan oleh kualitas instrumen yang dipergunakan. Artinya, data yang bersangkutan dapat mewakili dan atau mencerminkan keadaan sesuatu yang diukur pada diri subjek penelitian dan si pemilik data.

Untuk itu peneliti kuantitatif harus berfikir bagaimana memperoleh data seakurat mungkin dari subjek penelitian sehingga data-data itu dapat dipertanggung jawabkan dari pada berpikir teknik statistik apa yang akan dipergunakan untuk mengolahnya. Untuk menguji kualitas instrumen penelitian ini digunakan dua uji, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas.

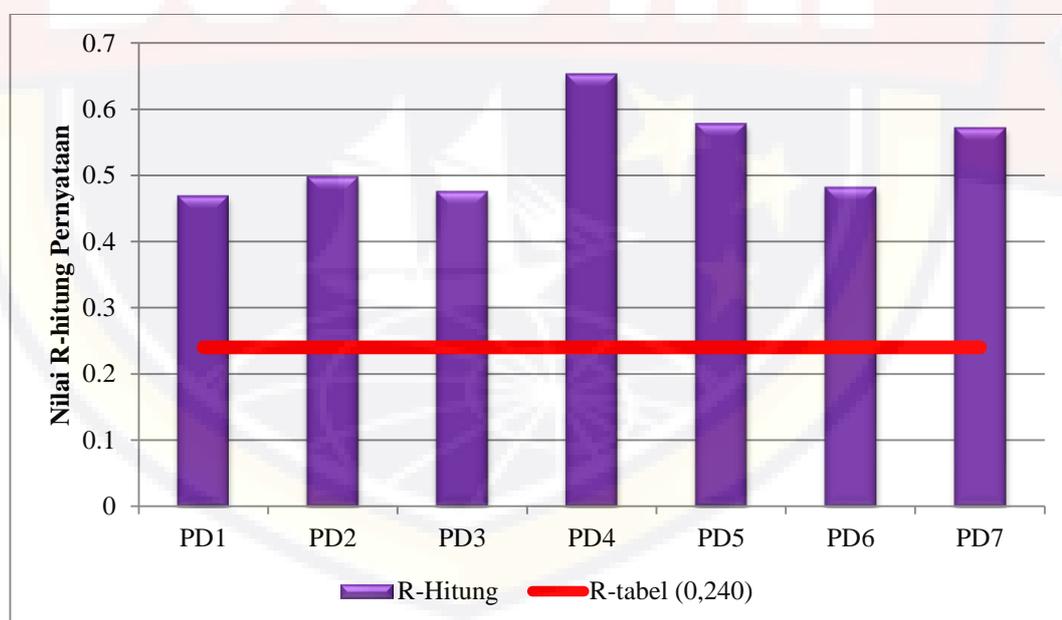
1. Uji Validitas

Ghozali (2013) menyatakan uji validitas dilakukan dengan cara melakukan korelasi bivariate antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. Teknik pengujiannya menggunakan teknik korelasi

product moment dan *pearson* dengan menggunakan tingkat signifikansi 2,5%, untuk mengetahui keeratan pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Untuk menguji validitas maka terlebih dahulu harus menentukan r-tabelnya dengan cara :

$$\begin{aligned}
 r - \text{tabel} &= \text{Jumlah Sampel} - 2 \\
 &= 50 - 2 \\
 &= 48 \text{ (pada taraf signifikansi } 0,05) \\
 &= 0,240
 \end{aligned}$$

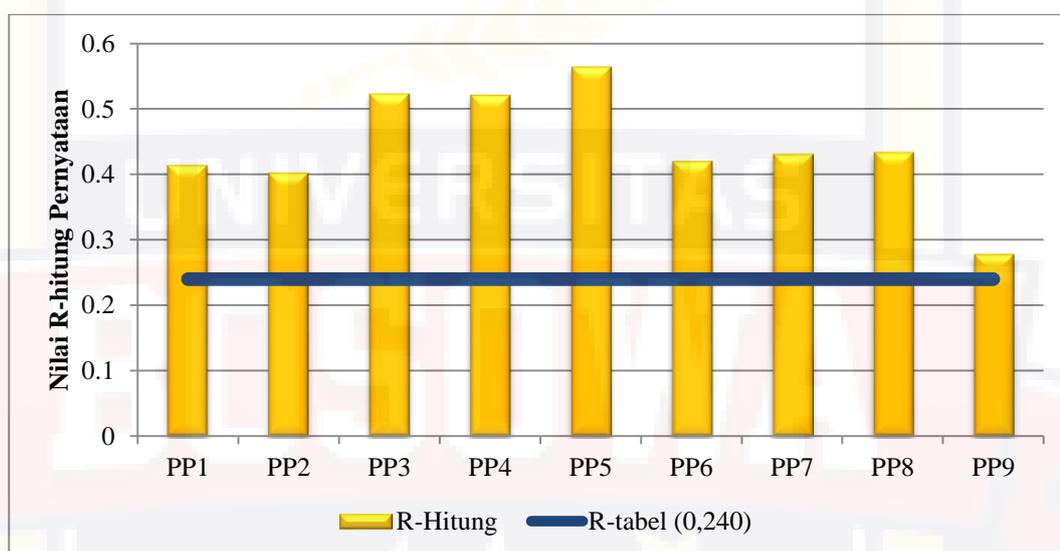
Penelitian ini merupakan penelitian satu arah/satu sisi, sehingga jika dilihat pada tabel r (korelasi *pearson*) nilai r-tabel 48 pada uji satu sisi adalah 0,240. Hasil Pengujian validitas variabel pengawasan detektif dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Sumber : Hasil Analisis SPSS 24, Lampiran 4 (2018)

Gambar 4.8 Hasil Uji Validitas Variabel Pengawasan Detektif

Hasil analisis data menunjukkan bahwa variabel pengawasan detektif yang terdiri dari 7 item pernyataan dapat dinyatakan bahwa semua instrumen pernyataannya adalah valid karena telah nilai r-hitung telah berada diatas r-tabel 0,240. Selanjutnya peneliti melakukan uji validitas pada variabel pengawasan preventif, hasilnya dapat dilihat pada gambar berikut ini :



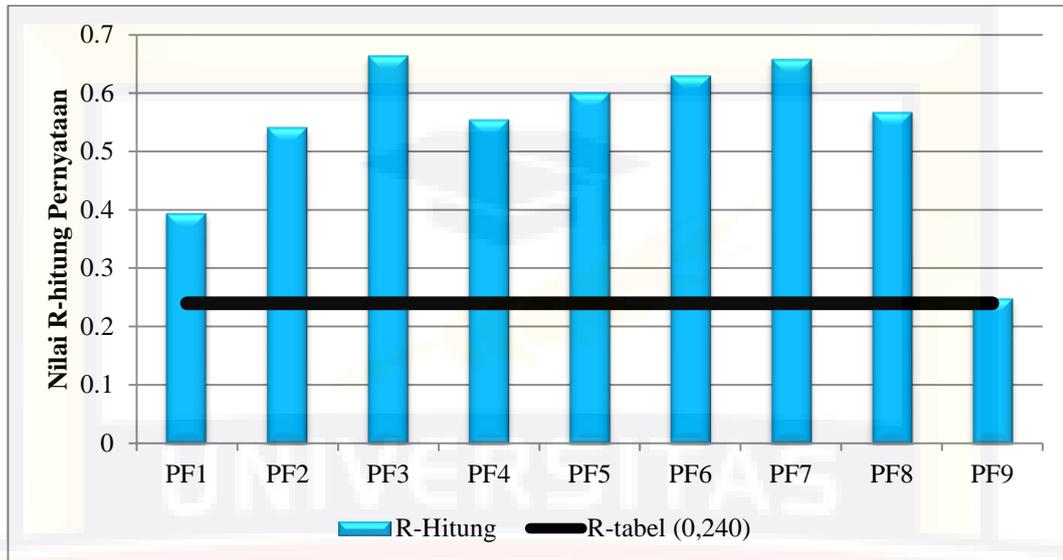
Sumber : Hasil Analisis SPSS 24, Lampiran 4 (2018)

Gambar 4.9 Hasil Uji Validitas Variabel Pengawasan Preventif

Hasil analisis data menunjukkan bahwa variabel pengawasan preventif yang terdiri dari 9 item pernyataan dapat dinyatakan bahwa semua instrumen pernyataannya adalah valid karena telah nilai r-hitung telah berada diatas r-tabel 0,240. Selanjutnya peneliti melakukan uji validitas pada variabel pengawasan fungsional.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa variabel pengawasan fungsional yang terdiri dari 9 item pernyataan dapat dinyatakan bahwa

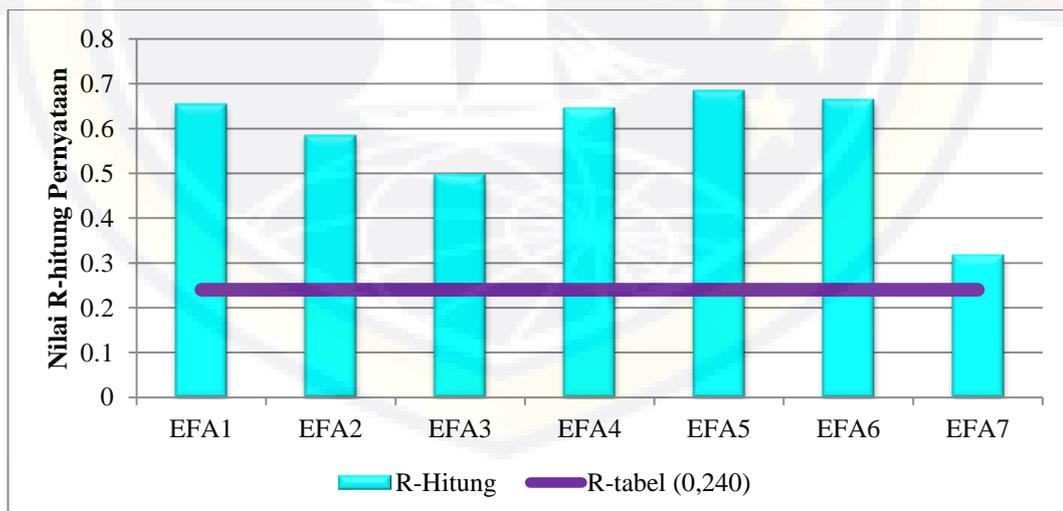
semua instrumen pernyataannya adalah valid karena telah nilai r-hitung telah berada diatas r-tabel 0,240. Hasilnya dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Sumber : Hasil Analisis SPSS 24, Lampiran 4 (2018)

Gambar 4.9 Hasil Uji Validitas Variabel Pengawasan Fungsional

Selanjutnya peneliti melakukan uji validitas pada variabel pengawasan fungsional, hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :



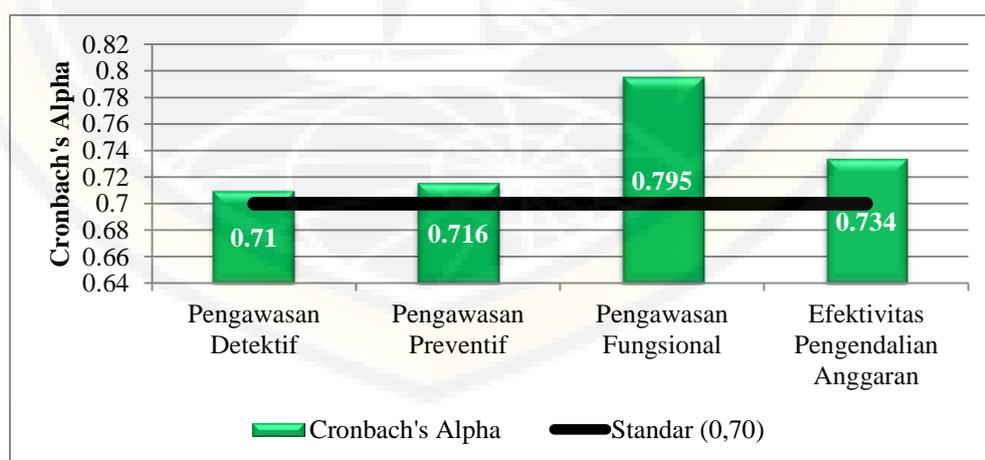
Sumber : Hasil Analisis SPSS 24, Lampiran 4 (2018)

Gambar 4.10 Hasil Uji Validitas Variabel Efektivitas Pengendalian Anggaran

Hasil analisis data menunjukkan bahwa variabel efektivitas pengendalian anggaran yang terdiri dari 7 item pernyataan dapat dinyatakan bahwa semua instrumen pernyataannya adalah valid karena telah nilai r-hitung telah berada diatas r-tabel 0,240. Kesimpulan dari hasil uji validitas instrumen variabel independen dan dependen menunjukkan kesemua item instrument penelitian adalah valid, sehingga dapat dilakukan ke tahapan pengujian selanjutnya.

2. Uji Reliabilitas

Menurut Sugiyono (2012:121) “instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Setelah instrumen di uji validitasnya maka langkah selanjutnya yaitu menguji reliabilitas. Suatu konstruks atau variabel dinyatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach alpha* $> 0,70$ (Ghozali, 2013). Pengujian reliabiitas selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Sumber : Hasil Analisis SPSS 24, Lampiran 5 (2018)

Gambar 4.11 Hasil Uji Reliabilitas

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa hasil uji reliabilitas variabel pengawasan detektif mampu mengukur model (*konstruk*) sebesar 71 %, variabel pengawasan preventif mampu mengukur model (*konstruk*) sebesar 0,716 %, variabel pengawasan fungsional mampu mengukur model (*konstruk*) sebesar 79,5% dan variabel efektivitas pengendalian anggaran mampu mengukur model (*konstruk*) sebesar 73,4%.

Kesimpulannya adalah hasil uji reliabilitas instrumen kesemua variabel penelitian menunjukkan bahwa, penelitian mempunyai koefisien keadaan/alpha lebih besar dari 0,7 sehingga semua instrumen dinyatakan *reliabel*, dengan demikian data penelitian tersebut bersifat valid dan layak digunakan untuk pengujian hipotesis.

D. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinary least square (OLS) Pengujian ini bertujuan untuk memperoleh nilai penduga yang tidak bias dan efisien dari suatu persamaan regresi berganda, maka datanya harus memenuhi kriteria asumsi klasik sebagai berikut :

1. Uji Multikolinearitas

Ghozali (2013) menyatakan uji multikolinearitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independen*). Uji Multikolinearitas digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas. Pengujian ini dilakukan dengan cara dengan melihat VIF (*Variance Inflation Factors*) dan nilai tolerance. Jika tolerance

$> 0,10$ dan nilai $VIF < 10$ maka dinyatakan tidak terjadi korelasi sempurna antara variabel independen dan sebaliknya. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1

Hasil Pengujian Multikolinearitas

Variabel Bebas	<i>Collinearity</i>	<i>Collinearity</i>	Keterangan
	<i>Statistics</i>	<i>Statistics</i>	
	<i>Tolerance</i>	VIF	
Pengawasan Detektif	0,556	1,749	Non Multikol
Pengawasan Preventif	0,672	1,489	Non Multikol
Pengawasan Fungsional	0,633	1,579	Non Multikol

Sumber : Hasil analisis data SPSS 24, 2017 (Lampiran 6)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa angka *tolerance* dari variabel independen semuanya menunjukkan angka $> 0,10$ hal ini berarti bahwa tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Kemudian angka *variabel inflation factor* (VIF) tidak ada satupun dari variabel independen yang menunjukkan angka > 10 . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi multikolinearitas antara variabel independen tersebut.

2. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan

ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heterkodesastisitas. Kebanyakan data *cross section* mengandung situasi heterokedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang dan besar), Ghozali (2013).

Uji heterokedastisitas akan dilakukan dengan metode Uji Glejser. Duwi Priyatno (2016) menyatakan *Uji Glejser* yaitu meregresikan *absolute residual* dengan masing-masing variabel independen. Jika pada uji t nilai signifikansi antara variabel independen dengan *absolute residual* lebih dari 0,05 maka tidak terjadi heterokedastisitas. Adapun hasil uji heterokedastisitas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2

Hasil Pengujian Heterokedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	.038	.252		.152	.880
	Pengawasan_Deteksi	-.095	.054	-.330	-1.746	.087
	Pengawasan_Preventif	.032	.063	.088	.510	.613
	Pengawasan_Fungsional	.083	.050	.296	1.667	.102

a. Dependent Variable: residual

Sumber : Hasil analisis data SPSS 24, 2017 (Lampiran 8)

Berdasarkan Hasil uji heterokedastisitas dapat dinyatakan bahwa nilai signifikansi variabel kecerdasan emosional (0,801), signifikansi variabel pendidikan (0,784) dan signifikansi variabel kepuasan kerja (0,806). Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterkodesastisitas antar variabel independen, karena nilai signifikansi masing-masing variabel telah lebih dari 0,05.

3. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid. Model regresi yang baik adalah model yang berdistribusi normal. Metode ini disebut juga uji *kolmogorov smirnov*, Ghozali (2013). Hasil penelitian dikategorikan berdistribusi normal jika nilai signifikansi berada diatas 0,50.

Tabel 4.3

Hasil Uji Normalitas

Variabel Bebas	<i>Monte Carlo</i> <i>Sig. (2-tailed)</i>	Keterangan
Pengawasan Detektif	0,349	Non Multikol
Pengawasan Preventif	0,168	Non Multikol
Pengawasan Fungsional	0,655	Non Multikol
Efektifitas Pengendalian Anggaran	0,420	Non Multikol

Sumber : Hasil analisis data SPSS 24, 2017 (Lampiran 9)

Berdasarkan tabel diatas dapat dinyatakan bahwa nilai signifikansi hasil pengujian masing-masing variabel independen dan dependen telah berada di atas 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal.

4. Uji Linearitas

Duwi Priyatno (2016) menyatakan uji linearitas merupakan uji prasyarat yang biasanya dilakukan jika akan melakukan analisis korelasi pearson atau regresi linear. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel secara signifikan mempunyai hubungan yang linear atau tidak. Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linear bila signifikansi (*deviation from Linearity*) lebih dari 0,05.

Tabel 4.4

Hasil Uji Linearitas

Hubungan Variabel Penelitian	<i>Deviation from Linearity (Sig)</i>	Kesimpulan
Pengawasan Detektif → Efektivitas Pengendalian Anggaran	0,838	Linear Signifikan
Pengawasan Preventif → Efektivitas Pengendalian Anggaran	0,079	Linear Signifikan
Pengawasan Fungsional → Efektivitas Pengendalian Anggaran	0,949	Linear Signifikan

Sumber : Hasil analisis data SPSS 24, 2017 (Lampiran 10)

Hasil pengujian membuktikan bahwa ketiga variabel independen memiliki hubungan yang linear dan signifikan terhadap variabel dependen.

Hal ini dapat dilihat nilai *deviation from linearity* yang nilai signifikansinya semuanya berada diatas 0,05.

E. Pengujian Hipotesis (Uji t)

Pengujian hipotesis secara parsial digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen secara parsial, apakah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel dependen Model hipotesis dalam penelitian ini adalah satu arah/satu sisi, jadi untuk melakukan pengujian hipotesis peneliti akan ditentukan terlebih dahulu t-tabel pada signifikansi 0,05 (satu arah) melalui rumus berikut ini :

$$Df = \text{Jumlah sampel} - (\text{jumlah variabel independen} + \text{variabel independen}) - 1$$

$$Df = 50 - 4 - 1$$

$$Df = 45 \text{ pada taraf signifikansi } 0,05$$

$$t\text{-tabel} = 1,676$$

Untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independen pengawasan detektif, pengawasan preventif dan pengawasan fungsional secara parsial terhadap variabel dependen efektivitas pengendalian anggaran, dapat dilakukan dengan cara melihat $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ (1,676) dan $\alpha \leq 0,05$. Hasilnya dapat dilihat pada pengujian hipotesis dibawah ini :

1. Pengujian Hipotesis 1

Hipotesis pertama dinyatakan bahwa bahwa pengawasan detektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengendalian anggaran *SKPD Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan*. Hasil pengujian terhadap variabel pengawasan detektif menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi (B) sebesar 0,274 kemudian nilai t–hitung sebesar $2,592 > t\text{-tabel}$ 1,676 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,013 < 0,05$. Kesimpulan dari hasil pengujian menunjukkan bahwa pengawasan detektif berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap efektivitas pengendalian anggaran *SKPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan*. Dengan demikian hipotesis pertama dinyatakan dapat diterima kebenarannya.

2. Pengujian Hipotesis 2

Hipotesis kedua dinyatakan bahwa bahwa pengawasan preventif berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengendalian anggaran *SKPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan*. Hasil pengujian terhadap variabel pengawasan preventif menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi (B) sebesar 0,282 kemudian nilai t–hitung sebesar $2,302 > t\text{-tabel}$ 1,676 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,026 < 0,05$. Kesimpulan dari hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel pengawasan preventif berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap efektivitas pengendalian anggaran *SKPD Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan*. Dengan demikian hipotesis kedua dinyatakan dapat diterima kebenarannya.

3. Pengujian Hipotesis 3

Hipotesis ketiga dinyatakan bahwa bahwa pengawasan fungsional berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengendalian anggaran *SKPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan*. Hasil pengujian terhadap variabel pengawasan fungsional menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi (B) sebesar 0,532 kemudian nilai t -hitung sebesar 5,515 > t -tabel 1,676 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Kesimpulan dari hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel pengawasan fungsional berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap efektivitas pengendalian anggaran *SKPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan*. Dengan demikian hipotesis ketiga dinyatakan dapat diterima kebenarannya.

F. Pengujian Secara Simultan (Uji F)

Pengujian hipotesis secara simultan bertujuan untuk melihat semua variabel independen pengawasan detektif, pengawasan preventif dan pengawasan fungsional terhadap variabel dependen efektivitas pengendalian anggaran.

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai F hitung yang diperoleh adalah F hitung 41,479 > F tabel 8,62 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi α 0,05 atau ($0,00 < 0,05$). Dengan demikian bahwa secara simultan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel independen pengawasan detektif, pengawasan preventif dan pengawasan fungsional terhadap variabel dependen efektivitas pengendalian anggaran dependen secara bersama-sama (simultan).

Hasil pengujian hipotesis secara simultan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.5
Hasil Pengujian Simultan

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.941	3	.980	41.479	.000 ^b
	Residual	1.087	46	.024		
	Total	4.028	49			

a. Dependent Variable: Efektivitas_Pengendalian_Anggaran

b. Predictors: (Constant), Pengawasan_Fungsional, Pengawasan_Preventif, Pengawasan_Deteksi

Sumber : Hasil analisis data SPSS 24, 2017 (Lampiran 11)

G. Analisis Regresi Linear Berganda

Pengujian pengaruh pengawasan detektif, pengawasan preventif dan pengawasan fungsional terhadap efektivitas pengendalian anggaran menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Teknik ini digunakan untuk meramalkan pengaruh dua variabel atau lebih variabel bebas (X) terhadap sebuah variabel terikat (Y) atau untuk membuktikan bahwa terdapat atau tidak terdapatnya hubungan antara dua variabel atau lebih variabel bebas dengan sebuah variabel terikat. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.6

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	-.423	.487		-.867	.391
	Pengawasan_Deteksi	.274	.106	.266	2.592	.013
	Pengawasan_Preventif	.282	.123	.215	2.302	.026
	Pengawasan_Fungsional	.532	.096	.531	5.515	.000

a. Dependent Variable: Efektivitas_Pengendalian_Anggaran

Sumber : Hasil analisis data SPSS 24, 2017 (Lampiran 11)

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dirumuskan persamaan regresi linear sebagai berikut :

$$EFA = -0,423 + 0,274PD + 0,282PR + 0,532PF + e$$

H. Pengujian Koefisien Determinasi

Pengujian koefisien determinasi digunakan untuk menerangkan seberapa besar pengaruh dari seluruh variabel independen pengawasan detektif, pengawasan preventif dan pengawasan fungsional terhadap variabel dependen efektivitas pengendalian anggaran. Nilai koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.7

Hasil Pengujian Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.854 ^a	.730	.713	.15373513300000

a. Predictors: (Constant), Pengawasan_Fungsional, Pengawasan_Preventif, Pengawasan_Deteksi

b. Dependent Variable: Efektivitas_Pengendalian_Anggaran

Sumber : Hasil analisis data SPSS 24, 2017 (Lampiran 11)

Tabel dibawah ini menunjukkan bahwa hasil pengujian Koefisien Determinasi adalah sebesar 0,730. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen pengawasan detektif, pengawasan preventif dan pengawasan fungsional terhadap variabel dependen efektivitas pengendalian anggaran SKPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah sebesar 73 %, sedangkan sisanya 27 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Angka R sebesar 854^a menggambarkan korelasi atau hubungan variabel terikat dengan variabel bebas artinya adanya hubungan yang positif dan erat antara pengawasan detektif, pengawasan preventif dan pengawasan fungsional dengan efektivitas pengendalian anggaran SKPD Kabupaten Pangkajene dan

Kepulauan sebesar 85,4 %, kekuatan korelasi tersebut termasuk kategori sangat kuat.

I. Variabel Dominan Berpengaruh

Pengujian ini bertujuan untuk menentukan variabel independen (pengawasan detektif, pengawasan preventif dan pengawasan fungsional) yang paling tinggi pengaruhnya terhadap variabel dependen efektivitas pengendalian anggaran.

Berdasarkan persamaan regresi linear berganda terhadap ketiga variabel independen pengawasan detektif, pengawasan preventif dan pengawasan fungsional terhadap efektivitas pengendalian anggaran, terlihat bahwa variabel pengawasan fungsional memiliki angka *unstandardized coefficient* atau angka beta paling besar yaitu 0,532 dibandingkan variabel pengawasan preventif sebesar 0,282 dan variabel pengawasan detektif sebesar 0,274.

Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengawasan fungsional merupakan variabel yang berpengaruh paling tinggi terhadap efektivitas pengendalian anggaran pada SKPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Uraian tersebut menunjukkan bahwa variabel pengawasan fungsional mempunyai peranan yang paling penting dalam meningkatkan efektivitas pengendalian anggaran pada SKPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

J. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Pengawasan Detektif Terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran Pada SKPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Menurut Revrisond (2000:123), pengawasan detektif adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen-dokumen laporan pertanggungjawaban bendaharawan. Pengawasan detektif biasanya dilakukan setelah dilakukannya kegiatan, yaitu dengan membandingkan antara hal yang sudah terjadi dengan hal yang seharusnya terjadi. Pengawasan detektif dimaksudkan untuk mengetahui apakah kegiatan dan pembiayaan yang telah ditentukan itu telah mengikuti kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Kesimpulan dari hasil pengujian menunjukkan bahwa pengawasan detektif berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap efektivitas pengendalian anggaran SKPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Nilai koefisien pengawasan detektif sebesar 0,274 berarti bahwa setiap terjadi kenaikan skor pengawasan detektif, maka akan diikuti oleh kenaikan efektivitas pengendalian anggaran sebesar 0,274 satuan.

Hasil analisis frekuensi menunjukkan bahwa pernyataan PD6 (Realisasi anggaran telah berdasarkan kontrak yang berlaku) merupakan pernyataan yang berpengaruh paling tinggi terhadap variabel pengawasan detektif. Sedangkan pernyataan yang berpengaruh paling kecil yakni pernyataan PD7 (Administrasi kegiatan di lapangan sinkron dengan administrasi bendahara pengeluaran).

Pengawasan detektif biasanya dilakukan setelah dilakukannya kegiatan, yaitu dengan membandingkan antara hal yang terjadi dengan hal yang seharusnya terjadi. Pengawasan detektif Pada SKPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dimaksudkan untuk mengetahui apakah kegiatan dan pem-biayaan yang telah ditentukan itu telah mengikuti kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fuadi (2013). Yang menemukan bahwa pengawasan detektif berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran.

2. Pengaruh Pengawasan Preventif Terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran Pada SKPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Menurut Baswir (2000:120), pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum dimulainya pelaksanaan suatu kegiatan, atau sebelum terjadinya pengeluaran keuangan negara. Pengawasan preventif pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada dasarnya dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan - penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan.

Kesimpulan dari hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel pengawasan preventif berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap efektivitas pengendalian anggaran SKPD Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan. Nilai koefisien pengawasan preventif sebesar 0,282 berarti bahwa setiap terjadi kenaikan skor pengawasan preventif, maka akan diikuti oleh kenaikan efektivitas pengendalian anggaran sebesar 0,282 satuan.

Hasil analisis frekuensi menunjukkan bahwa pernyataan Pernyataan PP1 (Pimpinan dan inspektorat telah melakukan review atas kinerja SKPD) dan pernyataan PP2 (Setiap SKPD telah memiliki jenjang pembinaan sumber daya manusia sebagai bagian dari pengawasan), merupakan pernyataan yang berpengaruh paling tinggi terhadap variabel pengawasan preventif. Sedangkan pernyataan PP7 (SKPD telah melaksanakan dokumentasi yang baik atas system pengendalian intern, transaksi dan kejadian penting) merupakan pernyataan yang paling kecil kontribusinya terhadap variabel pengawasan preventif.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fuadi (2013) yang menemukan bahwa pengawasan sebelum dilaksanakan dapat membuktikan keberhasilan suatu kegiatan dan program yang dikaitkan dengan tujuan yang ditetapkan. Hasil penelitian Bayu (2017) juga sesuai dengan hasil penelitian ini, Bayu menemukan bahwa pengawasan preventif berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian anggaran. Hal ini berarti dengan adanya pengawasan preventif, maka akan meningkatkan efektivitas pengendalian anggaran di SKPD Kota Dumai. Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian Julio (2014) menemukan bahwa Pengawasan preventif tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengendalian anggaran dengan studi empiris pada SKPD Kabupaten Kampar.

3. Pengaruh Pengawasan Fungsional Terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran Pada SKPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Menurut Sumarsono (2010;253) pengertian pengawasan fungsional adalah Pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional baik yang berasal dari lingkungan internal pemerintah maupun yang berasal dari lingkungan eksternal pemerintah. Pengawasan fungsional adalah Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga/ badan/ Inti yang mempunyai tugas melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian, penilaian, monitoring, dan evaluasi.

Kesimpulan dari hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel pengawasan fungsional berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap efektivitas pengendalian anggaran SKPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Nilai koefisien pengawasan fungsional sebesar 0,532 berarti bahwa setiap terjadi kenaikan skor pengawasan fungsional, maka akan diikuti oleh kenaikan efektivitas pengendalian anggaran sebesar 0,532 satuan.

Hasil analisis frekuensi menunjukkan bahwa pernyataan PF8 (APIP telah melaksanakan pemeriksaan terhadap SKPD dalam kurun waktu satu tahun anggaran) merupakan pernyataan yang berpengaruh paling tinggi terhadap pengawasan fungsional. Sedangkan pernyataan PF4 (SKPD telah melakukan analisis keuangan setiap program atau kegiatan selesai dilaksanakan) merupakan pernyataan yang kontribusinya paling kecil terhadap variabel pengawasan fungsional.

Pengawasan fungsional pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dilakukan oleh Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) atau yang lebih dikenal dengan Inspektorat Daerah yang melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah, pada Inspektorat khususnya mengenai pengawasan fungsional pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah agar dapat memenuhi tujuan efektifitas pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

K. Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian ini masih terbatas pada meneliti pengaruh pengawasan detektif, pengawasan preventif pengawasan fungsional terhadap efektifitas pengendalian anggaran. Masih ada variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini, seperti pengawasan melekat dan pengawasan lainnya.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak memiliki keterbatasan. Diantara keterbatasan tersebut adalah tidak dilakukannya metode wawancara dalam penelitian, mengingat kesibukan dari pihak responden. Responden meminta agar kuesioner ditinggalkan, sehingga peneliti tidak bisa mengendalikan jawaban responden. Oleh karena itu, jawaban yang diberikan oleh responden belum tentu menggambarkan keadaan sebenarnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat dari analisis pengaruh pengawasan detektif, pengawasan preventif pengawasan fungsional terhadap efektifitas pengendalian anggaran adalah :

1. Pengawasan detektif berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap efektifitas pengendalian anggaran SKPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Melalui pengawasan detektif aparatur pengawasan dapat meneliti dan mengevaluasi dokumen-dokumen laporan pertanggungjawaban bendaharawan untuk mengetahui apakah kegiatan dan pembiayaan yang telah ditentukan itu apakah telah mengikuti kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga dapat menciptakan efektifitas pengendalian yang efektif.
2. Pengawasan preventif berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap efektifitas pengendalian anggaran SKPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Pengawasan preventif dapat mencegah terjadinya penyimpangan terhadap anggaran, dan mencegah tidak tercapainya anggaran sesuai dengan yang telah ditetapkan, sehingga anggaran yang telah ditetapkan dapat diawasi penggunaannya sesuai dengan peruntungannya, dan tidak terjadi lagi dana-dana yang terbuang, dan tidak terserap secara penuh.

3. Pengawasan fungsional berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap efektivitas pengendalian anggaran SKPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Pengawasan fungsional sebagai bentuk kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan suatu pekerjaan atau kegiatan dilakukan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan, guna menanggulangi kemungkinan terjadinya penyimpangan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta peningkatan pendayagunaan aparatur negara dalam memberantas adanya unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

B. Saran-Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, maka peneliti menyarankan bahwa :

1. Aparat pemerintah hendaknya terus meningkatkan pengendalian terhadap anggaran, sehingga kebocoran dapat dihindarkan. Ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kerjasama dan komunikasi antara unit, sehingga tiap hambatan dapat diantipasi pemecahannya. Jadi pegawai bekerja tidak hanya sekedar memenuhi syarat minimum. Aparat pemerintah hendaknya terus meningkatkan kinerja pemerintah pada pengendalian anggaran.
2. Kejelasan aturan pelaksanaan anggaran harus diperjelas agar mengurangi penyimpangan anggaran dari pelaksanaan anggaran. Pemantauan secara terus menerus oleh atasan agar dapat mencapai tujuan dan sasaran anggaran, sehingga memberikan dorongan tersendiri terhadap pegawai dalam melaksanakan realisasi anggaran.

3. Diharapkan kepada SKPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk dapat mempertahankan efektivitas pengendalian anggarannya karena hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian anggaran sudah tergolong baik.
4. Dari hasil pengujian diketahui bahwa pengawasan fungsional mempunyai pengaruh yang paling kuat terhadap efektivitas pengendalian anggaran SKPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Untuk itu diharapkan kepada SKPD agar senantiasa melakukan pengawasan fungsional pada SKPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
5. Figur dan teladan pimpinan, salah satu kata kunci keberhasilan fungsi pengawasan, oleh sebab itu perlu peran pimpinan sebagai contoh bawahan berkaitan efektivitas penggunaan keuangan kantor.

Penelitian hanya membahas pengaruh pengawasan preventif, pengawasan detektif dan pengawasan fungsional terhadap efektivitas pengendalian anggaran. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai faktor-faktor lain yang mempengaruhi efektivitas pengendalian anggaran SKPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berdasarkan karakteristik serta alat analisis yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari S, Kamaliah dan Jaka Hendrawan. (2014). *Pengaruh Pengawasan Preventif, Pengawasan Detektif dan Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Kuantan Singingi)*. Jurnal Ekonomi Volume 22, Nomor 2 Juni 2014. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau.
- Anthony dan Govindarajan. (2005). *Management Control System, Edisi 11*, Penerjemah: F.X. Kurniawan Tjakrawala, dan Krista. Penerbit Salemba Empat. Buku 2, Jakarta.
- Agus Sartono. (2010). *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi (4 th ed.)*. BPFE. Yogyakarta.
- Agung Kurniawan, (2005). *Transformasi Pelayanan Publik*, Pembaruan, Yogyakarta.
- Agoes, Sukrisno. (2004). *Auditing (Pemeriksaan Akuntan) Oleh Kantor Akuntan Publik. Edisi Ketiga*. Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti.
- Arif Fuadi. (2013). *Pengaruh Pengawasan Preventif Dan Pengawasan Detektif Terhadap efektifitas Pengendalian Anggaran (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Bukittinggi)*. Jurnal Akuntansi <http://ejournal.unp.ac.id> Vol 1, No 1 (2013).
- Bayu Yosa Baskara. (2017). *Pengaruh Pengawasan Preventif, Pengawasan Detektif Dan Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran. (Studi Empiris Pada SKPD Kota Dumai)*. JOM Fekon Vol. 4 No. 1 (Februari) 2017.
- Baldric Siregar dan Bonni Siregar. (2000). *Akuntansi Pemerintahan Dengan Sistem Dana*. BPFE. Yogyakarta.
- Bambang Riyanto. (2013). *Dasar-Dasar Pembelanjaan*, Edisi 4. BPFE. Yogyakarta.
- Baswir, Revrison. (2000). *Koperasi Indonesia. Edisi Pertama*. BPFE UGM. Yogyakarta.
- Basuki. (2007). *Pengelolaan Keuangan Daerah, Edisi I, Kreasi Wacana*, Yogyakarta.

- Cahyat, A. (2004). *Sistem Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten, Pembahasan Peraturan Perundangan di Bidang Pengawasan*, Governance Brief Number.
- Hanif Nurcholis. (2007). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Grasindo. Jakarta.
- Horne, James C. Van dan John M Wachowicz Jr. (2012). *Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan (Edisi 13)*. Salemba Empat. Jakarta.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Salemba Empat, Jakarta.
- Harmono. (2011). *Manajemen Keuangan Berbasis Balanced Scorecard Pendekatan Teori, Kasus dan Riset Bisnis (Edisi 1)*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Julio Herdi Peuranda, (2017). *Pengaruh Pengawasan Preventif dan Pengawasan Detektif terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kampar)*. JOM Fekon Vol. 1 No. 2 Oktober 2014.
- Kamaludin. (2011). *Manajemen Keuangan “Konsep Dasar Dan Penerapannya*, Mandar Maju. Bandung.
- Keputusan Presiden RI No. 74 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Lilik Singgih Purnomo, (2016). *Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja ,Pengawasan Preventif Dan Pengawasan Fungsional Fungsional Terhadap Pengendalian Anggaran SKPD Kabupaten Grobongan*.
- Mulyadi. (2002). *Auditing. Edisi Pertama*. Salemba Empat. Jakarta.
- Makmur. (2011). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Refika Aditama. Bandung.
- Mahmudi. (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik: Unit Penertiban dan Pencetakan Akademik Manakemen Perusahaan*, YKPN. Jogjakarta
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sector Publik*. Andi, Yogyakarta.
- Moenir, AS. (2006). *Manajemen Pelayanan Umum Diindonesia*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Nordiawan, Deddi., dkk. (2008). *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat, Jakarta.

- Pratama, Dafitra. (2014). *Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja, Pengawasan Preventif dan Pengawasan Detektif terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Pelalawan)*. Jurnal Fakultas Ekonomi, Universitas Riau Vol.1 No.2.
- Revrisond. (2000). *Akuntansi Pemerintah Indonesia*, . BPFU UGM. Yogyakarta.
- Sutrisno. (2012). *Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi* (8th ed.). Ekonisia, Yogyakarta.
- Sumarsono, Sonny. (2010). *Manajemen Keuangan Pemerintah*. Edisi Pertama. Graha ilmu.
- Sumaryadi Nyoman I. (2005). *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Citra Utama. Jakarta.
- Wati, Suhenda. 2011. *Analisis Atas Pengawasan Fungsional Pengaruhnya Terhadap Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Inspektorat Kota Bandung*. (Online), (elib.unikom.ac.id/download.php?id=77691).
- Widjaja, Gunawan. (2002). *Pengelolaan Harta Kekayaan Negara*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Wijayanti. (2010). *Efektivitas Pengawasan Fungsional Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung*.
- Zahnd, Markus. (2006). *Perancangan Kota Secara Terpadu*. Yogyakarta. Kanisius.